

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KOTA DI PULAU SUMATERA**



**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana  
Terapan (D-IV) Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Sriwijaya

**Oleh:**

**MSY. NUR AISYAH PUTRI**

**062140512619**

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2025**

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA PERIMBANGAN DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KOTA DI PULAU SUMATERA**



**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Sarjana  
Terapan (D-IV) Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Sriwijaya

**Oleh:**

**MSY. NUR AISYAH PUTRI**

**062140512619**

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2025**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414  
Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Msy. Nur Aisyah Putri  
NPM : 062140512619  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah,  
Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Perhitungan  
Anggaran Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Di  
Pulau Sumatera

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya buat dengan judul sebagaimana tersebut di atas beserta isinya merupakan hasil penulisan saya sendiri.
2. Skripsi tersebut bukan plagiat atau menyalin skripsi milik orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari dinyatakan plagiat atau menyalin skripsi milik orang lain, maka saya bersedia menanggung konsekuensinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, 31 Juli 2025.

Yang Membuat Pernyataan,



Msy. Nur Aisyah Putri

062140512619



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar – Palembang 30139 Telepon (0711) 353414

Laman : <http://polsri.ac.id>, Pos El : [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Msy. Nur Aisyah Putri  
NPM : 062140512619  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik  
Mata Kuliah : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah,  
Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan  
Anggaran Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di  
Pulau Sumatera

Telah diujikan pada Ujian Skripsi Tanggal 18 Juli 2025  
Dihadapan Tim Penguji Jurusan Akuntansi  
Prodi Akuntansi Sektor Publik  
Politeknik Negeri Sriwijaya

Menyetujui,  
Pembimbing I

Sulaiman, S.E., M.M  
NIP. 196103231990031001

Palembang, 2025

Pembimbing II

Sri Hartaty, S.E., M.Si, Ak., CA  
NIP. 197608192002122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 197104121998022001







KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar-Palembang 30139 Telepon (0711) 353414  
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El: [info@polsri.ac.id](mailto:info@polsri.ac.id)

**PELAKSANAAN REVISI SKRIPSI**

Mahasiswa berikut:

Nama : Msy. Nur Aisyah Putri  
NIM : 062140512619  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/D-IV Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera

Telah melaksanakan revisi terhadap Skripsi yang diujikan pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025. Pelaksanaan revisi terhadap Skripsi tersebut telah disetujui oleh Dosen Penguji yang memberikan revisi.

No	Komentar	Nama Dosen Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	-	Sulaiman, S.E., M.M NIP. 196103231990031001	29/7-2025	
2	- Perbaiki Penulisan	Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak NIP. 197610212001122001	23/7-2025	
3	- Tambahkan rujukan peneliti terdahulu min.5 berpengaruh dan 5 yang tidak berpengaruh	Yevi Dwitayanti, S.E., M.Sc NIP.198205232014042001	23/7/25	
4	- Tambahkan dampak dari <i>Flypaper Effect</i> dan persamaan dana perimbangan digunakan untuk apa	Meilinda Dwi Anugrah, S.E., M.Sc NIP. 199305062022032009	22-07-2025	

Palembang, 29 Juli 2025

Ketua Penguji

Sulaiman, S.E., M.M

NIP 196103231990031001

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”**

**(Q.S Al-Insyirah, 94: 6-8)**

**“Angin tak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”**

**(Ali bin Abi Thalib)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ Ayah dan Ibu tersayang yang selalu memberikan dukungan serta doa di setiap langkah.**
- ❖ Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat serta doa disetiap saat.**
- ❖ Sahabat-sahabat, orang terdekat, dan orang-orang yang selalu memberi dukungan.**
- ❖ Kedua Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan.**
- ❖ Teman-teman seperjuangan dari kelas 8 APC.**
- ❖ Segenap Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya yang sangat berjasa karena sudah mendidik serta membimbing selama perkuliahan.**
- ❖ Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanjada Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera**”. Sejalan dengan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Irawan Rusnadi, M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
2. Ibu Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak Jovan Febriantoko, S.E., Ak., M.Acc. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Ibu Desi Indriasari, S.E., M.Si., Ak. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya.
5. Bapak Sulaiman, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, arahan, masukan serta solusi yang positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
6. Ibu Sri Hartaty, S.E., M.Si, Ak., CA selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, masukan serta solusi yang positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, terima kasih atas ilmu dan didikan yang telah diberikan selama ini.
8. Seluruh staf administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta doa yang tiada henti. Segala kasih sayang, pengorbanan dan perhatian yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Abang dan Adik yang selalu memberikan dukungan, nasihat, semangat serta do'a utuk keberhasilan penulis.

11. Kepada Julio Satria Pratama yang telah memberikan semangat, membantu, mendengarkan, serta menemani penulis selama proses pembuatan skripsi.
12. Kepada Wira, Bila, Indi, dan Pitri yang telah memberikan masukan, menemani, serta memberikan semangat yang tiada henti. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan dengan terus menanyakan perkembangan skripsi ini, serta kesediaan untuk mendengarkan setiap cerita.
13. Kepada Vinta, Cici, Rahma dan Sindy yang telah berjuang bersama dari semester 1 hingga sekarang. Terima kasih untuk telinga yang siap mendengar dan tangan yang selalu diulurkan.
14. Kepada Mutiara Zuryatina, terima kasih atas saran berharga yang telah diberikan terkait pemilihan judul, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap masukan serta kesediaannya untuk mendengarkan dan merespons setiap pertanyaan yang penulis ajukan.
15. Teman-teman kelas 8 APC Jurusan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya, yang selalu membantu dan menyemangati penulis.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum tersusun dengan sempurna, karena masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan penulisan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi para pembaca. Apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, penulis mohon maaf dan mengucapkan terima kasih.

Palembang, 2025

Penulis



## **ABSTRACT**

***Analysis of The Flypaper Effect of Regional Original Revenue, Balance Fund, and Budget Surplus on Regional Expenditure in Cities of Sumatera Island***

**Msy. Nur Aisyah Putri, 2025 (xii + 63 pages)**

**Email : [msynuraisyahp@gmail.com](mailto:msynuraisyahp@gmail.com)**

---

*This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD), Balance Fund, and Budget Surplus (SiLPA) on Regional Expenditure, as well as to identify the presence of the Flypaper Effect phenomenon in municipal governments across Sumatera Island during the 2019–2023 period. The data used are secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA) from the Local Government Financial Reports, obtained through Audit Reports (LHP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The study population includes 34 municipalities in Sumatera, with samples selected using purposive sampling. This research employs a quantitative approach using panel data analysis and multiple linear regression with the Fixed Effect Model approach. The results show that partially, PAD, Balance Fund, and SiLPA have a positive and significant effect on Regional Expenditure. Simultaneously, these three variables also show a significant effect. Furthermore, the regression coefficient of Balance Fund is greater than that of PAD, indicating the occurrence of the Flypaper Effect. This study reveals that local governments are more responsive to central government transfers than to optimizing their own-source revenues.*

***Keywords : Regional Original Revenue, Balance Fund, Budget Surplus Regional Expenditure, Flypaper Effect***

## ABSTRAK

### **Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Di Pulau Sumatera**

**Msy. Nur Aisyah Putri, 2025 (xii + 63 halaman)**

**Email : [msynuraisyahp@gmail.com](mailto:msynuraisyahp@gmail.com)**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah, serta melihat apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada pemerintah kota di Pulau Sumatera selama periode 2019–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel dan metode regresi linier berganda menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien Dana Perimbangan lebih besar dibandingkan PAD, yang mengindikasikan terjadinya *Flypaper Effect*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan optimalisasi pendapatan asli daerahnya sendiri.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja Daerah, *Flypaper Effect*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL MUKA .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PELAKSANAAN REVISI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah .....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan.....	10
2.1.2 Belanja Daerah .....	11
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.1.4 Dana Perimbangan .....	14
2.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran .....	15
2.1.6 <i>Flypaper Effect</i> .....	16
2.2 Peneliti Terdahulu .....	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
2.4 Pengembahangan Hipotesis .....	22
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.....	22
2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.....	23
2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah .....	24
2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah secara simultan.....	25
2.4.5 <i>Flypaper Effect</i> pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.....	25

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
3.3 Variabel Penelitian .....	26
3.4 Populasi dan Sampel .....	28
3.4.1 Populasi .....	28
3.4.2 Sampel .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6 Teknik Analisis Data .....	30
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif.....	30
3.6.2 Analisis Regresi Data Panel .....	31
3.6.3 Uji Model Regresi Data Panel.....	32
3.6.4 Uji Asumsi Klasik .....	33
3.6.5 Analisis Model Terpilih.....	34
3.6.6 Uji Hipotesis.....	35
3.6.7 Pendeteksian <i>Flypaper Effect</i> .....	36
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	37
4.1.1 Analisis Variabel.....	37
4.1.2 Uji Statistik Deskriptif.....	42
4.1.3 Uji Model Regresi Data Panel.....	44
4.1.4 Uji Asumsi Klasik .....	46
4.1.5 Analisis Model Terpilih.....	49
4.1.6 Uji Hipotesis.....	50
4.1.7 Pendeteksian <i>Flypaper Effect</i> .....	54
4.2 Pembahasan.....	55
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah .....	55
4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah.....	57
4.3.3 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah .....	59
4.3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah secara Simultan .....	61
4.3.5 <i>Flypaper Effect</i> pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.....	63
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	66
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	PAD, Dana Transfer, SiLPA dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera Tahun 2022- 2023 .....	5
Tabel 3. 1	Operasional Variabel.....	27
Tabel 3. 2	Populasi .....	28
Tabel 3. 3	Kriteria Sampel Penelitian .....	29
Tabel 4. 1	Hasil Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4. 2	Hasil Uji Chow.....	45
Tabel 4. 3	Hasil Uji Hausman .....	45
Tabel 4. 4	Hasil Uji Pemilihan Model .....	46
Tabel 4. 5	Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4. 6	Hasil Durbin- Watson .....	48
Tabel 4. 7	Hasil Uji Autokorelasi .....	48
Tabel 4. 8	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	49
Tabel 4. 9	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	49
Tabel 4. 10	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R_2$ ) .....	51
Tabel 4. 11	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	52
Tabel 4. 12	Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	53
Tabel 4. 13	Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Belanja Daerah pemerintah kota di Pulau Sumatera tahun 2022-2023 .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4.1 Trend Pendapatan Asli Daerah Kota di Pulau Sumatera.....	37
Gambar 4.2 Trend Dana Perimbangan Kota di Pulau Sumatera.....	39
Gambar 4.3 Trend Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota di Pulau Sumatera .....	40
Gambar 4.4 Trend Belanja Daerah Kota di Pulau Sumatera .....	41
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas.....	46



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 2 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 5 : Tabulasi Data LN Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa  
Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah
- Lampiran 6 : Hasil Output
- Lampiran 7 : Tabel Uji F
- Lampiran 8 : Tabel Uji T

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, terutama setelah diterapkannya sistem desentralisasi di Indonesia. Meskipun telah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, pemerintah daerah tetap menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Untuk memastikan pemerataan pembangunan dan keseimbangan fiskal antar wilayah, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), dengan tujuan memperkuat otonomi daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, mendorong harmonisasi kebijakan fiskal, serta mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang lebih adil dan merata.

Penerapan sistem desentralisasi fiskal dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya, termasuk dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak daerah yang masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat menimbulkan *Flypaper Effect*, di mana dana yang diterima dari pusat lebih cepat terserap ke dalam belanja daerah dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari PAD.

Berdasarkan Nurhayati & Wicaksono (2017) *Flypaper Effect* merupakan fenomena yang terjadi saat pengeluaran daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah. Fenomena *Flypaper Effect* terjadi karena respons belanja daerah lebih besar bersumber dari dana perimbangan daripada pendapatan asli daerah sendiri. *Flypaper Effect* dapat menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pusat yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah, terutama ketika Pendapatan Asli Daerah relatif rendah. Potensi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan menjadi kurang maksimal, serta

menimbulkan risiko inefisiensi dan pemborosan anggaran karena belanja daerah lebih banyak dialokasikan dari dana perimbangan dibandingkan PAD. Ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan pusat dan kurang optimalnya pemanfaatan PAD dapat menyebabkan SiLPA, karena anggaran yang tersedia tidak seluruhnya terserap secara efektif dalam pelaksanaan belanja daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan indikator yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam mewujudkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Berikut gambar 1.1 yang merupakan data belanja daerah pada pemerintah kota di Pulau Sumatera tahun 2019-2023.



Sumber: BPK RI Tahun 2022-2023, 2025.

**Gambar 1. 1**  
**Grafik Belanja Daerah pemerintah kota di Pulau Sumatera**  
**tahun 2022-2023**

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat bahwa belanja daerah di sebagian pemerintah kota di pulau Sumatera mengalami peningkatan pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa kota Medan memiliki belanja daerah yang tertinggi pada pemerintah

kota di Pulau Sumatera yaitu sebesar Rp4 triliun pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan di tahun 2023 mencapai Rp4,07 triliun. Kota Sawahlunto tercatat sebagai daerah yang memiliki tingkat belanja yang paling rendah. Pada tahun 2022 mencapai Rp643 miliar dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar Rp607 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah di pemerintah kota di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi, sebagian besar daerah mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan belanja daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, kapasitas fiskal dan kemampuan belanja dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan utama seperti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, serta potensi pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi sumber pembiayaan utama yang berasal dari dalam daerah, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah, sedangkan PAD yang rendah membuat daerah lebih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari & Asyik (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dengan kata lain semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka semakin meningkat pula Belanja Daerah.

Pemerintah daerah memperoleh sumber pembiayaan dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana perimbangan sangat penting terutama bagi daerah yang memiliki PAD rendah, karena dapat menutup kekurangan kapasitas fiskal dan memastikan daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan belanja dan pelayanan publik secara optimal. Dana perimbangan dari pusat merupakan dana yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Daerah dapat menggunakan dana perimbangan dari pusat untuk membiayai kebutuhan belanja daerah. Penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Aminus (2018) Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dengan kata lain, semakin besar proporsi dana perimbangan yang digunakan oleh daerah, maka semakin tinggi pula ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), SiLPA merupakan saldo anggaran yang tidak terserap dalam satu tahun anggaran dan dapat digunakan untuk periode berikutnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keberadaan SiLPA dapat disebabkan oleh efisiensi anggaran, penundaan belanja, atau pendapatan yang melebihi target. Meskipun SiLPA dapat dimanfaatkan kembali, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama dalam mengelola anggarannya. Beberapa daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dibandingkan dengan pemanfaatan PAD dapat menimbulkan fenomena *Flypaper Effect*, di mana belanja daerah lebih responsif terhadap dana perimbangan daripada PAD Indrasari & Kholvieyana (2021).

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2019 hingga 2023, Pemerintah kota di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa masih banyak kota di Pulau Sumatera yang cenderung mengandalkan dana perimbangan daripada Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja daerah. Optimalisasi PAD di sejumlah daerah masih belum optimal, sehingga ketergantungan pada dana transfer dan SiLPA tetap konsisten tinggi setiap tahunnya. Berikut tabel 1.1 merupakan data Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah dari tahun 2022 hingga 2023 pada Kota di Pulau Sumatera.

**Tabel 1. 1**  
**PAD, Dana Transfer, SiLPA dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di**  
**Pulau Sumatera Tahun 2022- 2023**

**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Daerah	2022			2023		
	PAD	Dana Perimbangan	SiLPA	PAD	Dana Perimbangan	SiLPA
Banda Aceh	314.828	747.856	10.455	287.367	745.929	28.361
Langsa	146.281	513.622	31.417	166.292	568.738	38.667
Lhokseumawe	68.212	622.773	48.484	67.901	630.906	10.541
Sabang	53.882	405.284	48.750	52.561	407.684	35.306
Binjai	107.762	707.115	3.834	113.119	729.083	6.352
Gunungsitoli	25.231	525.350	38.831	27.398	578.847	52.842
Medan	2.230.554	2.081.057	1.146.596	2.442.782	2.482.957	548.544
Pematangsiantar	154.210	714.238	110.660	141.077	736.161	160.105
Sibolga	82.398	488.538	92.628	87.147	474.764	87.156
Tanjungbalai	61.141	502.484	50.342	82.710	525.847	32.978
Tebing Tinggi	88.747	479.094	31.682	97.310	520.298	5.114
Bukittinggi	130.796	532.574	132.979	123.112	526.134	77.322
Padang	612.831	1.480.305	25.646.	658.744	1.532.640	89.801
Padang Panjang	85.711	409.209	65.526	102.302	411.038	58.710
Pariaman	36.040	481.621	2.796	38.861	505.788	718
Payakumbuh	126.962	536.568	74.306	123.216	585.451	77.023
Sawahlunto	66.920	516.814	38.719	59.943	492.739	12.114
Pekanbaru	799.021	1.375.146	30.957	890.286	1.500.212	14.688
Tanjungpinang	180.494	758.042	94.315	161.184	672.530	119.560
Lubuk Linggau	104.399	779.113	27.978	120.635	704.821	31.125
Pagaralam	67.865	753.312	111.781	79.497	714.634	169.165
Prabumulih	101.593	775.516	147.952	120.616	847.023	154.555
Pangkalpinang	201.971	653.920	139.017	197.873	717.262	162.851
Bengkulu	200.427	853.401	60.452.	210.471	892.331	44.334.
Jambi	437.025	1.061.703	159.678	448.460	1.044.176	188.042
Sungai Penuh	69.262	591.309	64.065	69.634	596.922	49.763
Bandar Lampung	645.965	1.396.555	15.600	694.676	1.480.629	15.596
Metro	239.837	563.100	80.973	284.262	579.611	59.176

Sumber: BPK RI Tahun 2022-2023, 2025.

Berdasarkan gambar 3.1 dan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa pemerintah kota di Pulau Sumatera lebih banyak menggunakan dana perimbangan dibandingkan PAD untuk belanja daerah. Dapat dilihat bahwa belanja daerah yang tinggi tidak sebanding dengan PAD. Keadaan ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih mengutamakan penggunaan dana perimbangan yang diterima untuk kebutuhan belanja, dibandingkan PAD. Ketika belanja daerah yang berasal dari dana Perimbangan lebih besar daripada yang didanai oleh PAD, kondisi tersebut dikenal sebagai fenomena *Flypaper Effect*. Sejalan dengan penelitian yang



dilakukan oleh Solikin (2016) bahwa kondisi dimana belanja pemerintah daerah lebih cenderung merespon terhadap pendapatan dana perimbangan daripada terhadap pendapatan asli daerah. Hal yang sama juga dengan Fadilah & Helmayunita (2020) bahwa *Flypaper Effect* pada Provinsi di Indonesia merupakan kondisi dimana pemerintah daerah menggunakan dana perimbangan masih tinggi untuk membiayai Belanja Daerah.

Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat mencerminkan bahwa anggaran belum dimanfaatkan secara optimal, yang dapat menghambat efektivitas belanja daerah, Wira & Dewi (2023). SiLPA periode sebelumnya yang akan digunakan untuk menutupi belanja daerah, sehingga SiLPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah dimasa yang akan datang, Wira & Dewi (2023). Kondisi ini dapat memperkuat ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, karena anggaran yang tidak terserap menandakan belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya fiskal yang dimiliki daerah termasuk PAD dan dana transfer. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Solikin (2016) bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas dan terjadinya inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari & Asyik (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, serta penelitian lain oleh Aminus (2018) menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Nurhalisa dkk. (2020) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2020) menunjukkan bahwa terjadi *Flypaper Effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut memotivasi penulis untuk menguji kembali pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA terhadap belanja daerah, serta menguji apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada pemerintah kota di Pulau Sumatera selama periode 2019–2023. Pemilihan kota di pulau Sumatera didasari oleh masih banyak kota yang cenderung

mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat daripada PAD untuk membiayai belanja daerah.

Pemilihan kota di Pulau Sumatera sebagai objek penelitian didasari oleh dua pertimbangan utama. Pertama, masih banyak daerah di Pulau Sumatera yang cenderung mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, seperti DAU, DAK dan DBH dibandingkan dengan PAD untuk membiayai belanja daerah. Kedua, Kajian ilmiah yang secara spesifik menggunakan kota-kota di Pulau Sumatera sebagai objek penelitian masih relatif terbatas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyani dkk. (2024) yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan.” Perbedaan pertama terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian ini dilakukan pada kota di Pulau Sumatera dari tahun 2019-2023. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat penambahan variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.**"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dilakukan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera?
3. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera?
4. Apakah PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera?
5. Apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kota di kota Pulau Sumatera Tahun 2019-2023?

### **1.3 Batasan Masalah**

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan pembahasan tentang *Flypaper Effect*, PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Peneliti ini juga membatasi ruang lingkup pembahasan objek penelitian hanya pada tahun 2019-2023.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh SiLPA terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh PAD, Dana Perimbangan, SiLPA secara simultan terhadap Belanja Daerah.
5. Untuk mengidentifikasi apakah terjadi atau tidaknya *Flypape Effect* pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023,

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti nyata serta referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Pulau Sumatra. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan akademik dan praktis, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman, terutama dalam bidang keuangan sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pengalaman akademik yang berharga dalam menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan dapat memberikan manfaat, khususnya di Jurusan Akuntansi Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/i Politeknik Negeri Sriwijaya dan Perguruan tinggi lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan (*agency theory*) adalah suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pihak yang memberikan wewenang) dan agen (pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama *principal*). Dalam hubungan ini, agen diharapkan bertindak demi kepentingan *principal*, tetapi karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi (*asymmetric information*), agen dapat mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan prinsipal.

Pada sektor publik, pemerintah pusat berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang bertugas menyalurkan dan mengelola dana perimbangan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya secara mandiri. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan guna mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dana perimbangan ini harus dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah (agen) kepada pemerintah pusat (*principal*).

Dalam konteks pengelolaan PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap belanja daerah, asimetri informasi menjadi sumber utama permasalahan keagenan. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi spesifik, potensi pendapatan, dan kebutuhan riil wilayahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi yang kurang akurat atau tidak lengkap mengenai potensi PAD, sehingga alokasi Dana Perimbangan yang diterima tidak mencerminkan kebutuhan fiskal yang sebenarnya. Berdasarkan perencanaan belanja, memungkinkan agen untuk memprioritaskan proyek-proyek yang kurang optimal

dari perspektif nasional atau masyarakat luas, namun memberikan keuntungan tersendiri bagi agen, karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi validitas dan urgensi proyek tersebut secara menyeluruh. Dengan demikian, asimetri informasi menciptakan *information rent* bagi agen, di mana mereka dapat memanfaatkan keunggulan informasi untuk mengambil keputusan belanja yang lebih menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas alokasi dan penggunaan dana perimbangan.

Fenomena *Flypaper Effect* menggambarkan bahwa ketika pemerintah daerah menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat, pengeluaran daerah sering kali meningkat tanpa disertai peningkatan yang sebanding dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih cenderung untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan dana perimbangan, daripada berupaya mengoptimalkan sumber pendapatan daerah secara mandiri. Ketergantungan fiskal ini dapat menciptakan situasi di mana pemerintah daerah (agen) lebih fokus pada penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat daripada mencari solusi untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya, yang pada gilirannya mengurangi insentif untuk berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **2.1.2 Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Solikin (2016) belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu tahun periode anggaran yang merupakan tanggungan atau kewajiban daerah dan dapat mengurangi nilai kekayaan daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah yang optimal dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan



infrastruktur. Agar penggunaannya lebih terarah dan transparan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur klasifikasi belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi  
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal  
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja tanah, peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga  
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer  
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Kelompok belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. disertai dengan penegasan prinsip efisiensi dalam peraturan terbaru, diharapkan dapat mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada capaian hasil dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber dalam daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah

berdasarkan potensi yang dimiliki, sebagai bagian dari perwujudan desentralisasi fiskal. Sumber pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengklasifikasi pajak daerah menjadi pajak provinsi dan pajak Kab/Kota.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 22, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah merupakan penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam upaya peningkatan PAD untuk membiayai belanja daerah. Dengan optimalisasi sumber PAD dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Menurut Putri dkk. (2024), Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri secara finansial dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan belanja daerah, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal, untuk mendukung pengembangan program dan proyek daerah tanpa ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Peningkatan PAD tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga dapat meningkatkan alokasi untuk belanja daerah, terutama untuk program-program prioritas seperti pengembangan infrastruktur dasar dan peningkatan

kualitas pelayanan publik. Daerah dengan kontribusi PAD yang signifikan cenderung memiliki struktur belanja yang lebih stabil, karena tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi transfer pusat.

#### **2.1.4 Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Halim (2014),

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana yang bersifat “*block grant*” yang artinya ketika dana tersebut diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2. Dana Alokasi Khusus

DAK dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

3. Dana Bagi Hasil

DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah karena dana perimbangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Halim (2012) dalam Aminus (2018), semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula

belanja daerah yang akan dikeluarkan. Dana perimbangan dapat membantu pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, mendanai program prioritas nasional, serta mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan belanja daerah sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

### **2.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, penghematan belanja dan kewajiban pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Berdasarkan Putra (2018) SiLPA dapat digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Selain PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya, Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang dapat digunakan pada tahun berikutnya. SiLPA digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja daerah. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja daerah berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan penggunaan SiLPA untuk belanja modal yang tahun sebelumnya yang belum terealisasi, Putra (2018).

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang baik tidak hanya berkontribusi pada efisiensi keuangan daerah, tetapi juga menjadi alat strategis dalam perencanaan belanja daerah. Dengan memanfaatkan SiLPA secara bijaksana, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik terhadap SiLPA akan menciptakan ruang bagi inovasi dan pengembangan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

### **2.1.6 *Flypaper Effect***

Menurut Jannah (2020:4), *Flypaper Effect* adalah fenomena di suatu kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana perimbangan daripada pendapatan asli dari daerahnya sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah. Hal yang sama juga *Flypaper Effect* merupakan suatu kondisi stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah, Solikin (2016).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerah, sehingga kemandirian fiskal menjadi rendah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin besar. Akibatnya, daerah cenderung kurang memaksimalkan potensi PAD yang dimiliki dan terus berharap pada alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan operasional pemerintahannya. Fenomena *Flypaper Effect* ini menandakan bahwa semakin besar dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima, maka semakin besar pula belanja daerah yang dikeluarkan, sementara kontribusi PAD terhadap belanja daerah relatif kecil dan sering kali tidak signifikan. Berdasarkan Jannah (2020:4) dan Jesica & Satrianto (2019:800), *Flypaper Effect* dapat terjadi karena dua syarat yaitu:

1. Besarnya nilai koefisien Dana Perimbangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai koefisien PAD.
2. Apabila perbandingan koefisien regresi PAD terhadap jumlah koefisien regresi DAU, DBH, DAK  $> 1$  maka kondisi ini mengindikasikan tidak terjadi *Flypaper Effect*, namun apabila perbandingan koefisien regresi PAD terhadap jumlah koefisien regresi DAU, DBH, DAK  $< 1$  maka kondisi ini mengindikasikan terjadi *Flypaper Effect*.

## 2.2 Peneliti Terdahulu

Berikut ini disajikan di tabel 2.1 beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah :

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Fadilah, Helmayunita (2020)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia	Independen X1 : Dana Alokasi Umum X2 : Dana Alokasi Khusus X3 : Dana Bagi Hasil X4 : Pendapatan Asli Daerah  Dependen Y : Belanja Daerah	1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 2. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 3. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah. 4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 5. Terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada belanja daerah pemerintah provinsi di Indonesia.
2.	Sherlinda, Lorentino dan Rian (2019)	Fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada PAD, DAU dan DBH serta pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Pulau Jawa tahun 2013-2017	Independen X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Bagi Hasil  Dependen Y : Belanja Daerah	1. Terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada belanja daerah 2. PAD memiliki pengaruh negatif terhadap belanja daerah. 3. DAU memiliki pengaruh negatif terhadap belanja daerah. 4. DBH memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah.

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Helmi, Syofyan (2020)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat	Independen X1 : Dana Alokasi Umum X2 : Dana Alokasi Khusus X3 : Pendapatan Asli Daerah  Dependen Y : Belanja Daerah	1. DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. 2. DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. 3. PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. 4. DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah 5. Terjadinya fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada pemerintah Kab/kota di Sumatera Barat.
4.	Ade, Budi dan Baihaqsi (2021)	Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Independen X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus X4 : Dana Bagi Hasil  Dependen Y : Belanja Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. 4. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanj Daerah. 5. Terjadinya fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Kab/Kota di Tingkat Karesidenan Pekalongan tahun 2016-2019.
5.	Fibriana (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah serta	Independen X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan X3 : SiLPA  Dependen	1. PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. 2. DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. 3. DAU berpengaruh terhadap belanja daerah.

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		analisis <i>Flypaper Effect</i> (studi pada pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur)	Y : Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. DAK berpengaruh terhadap belanja daerah.</li> <li>5. SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.</li> <li>6. Tidak terjadinya fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di tahun 2015-2016.</li> </ol>
6.	Cahyani, Firmansyah dan Dwiyanti (2024)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022	<p>Independen  X1 : Dana Alokasi Umum  X2 : Dana Alokasi Khusus  X3 : Dana Bagi Hasil  X4 : Jumlah Penduduk  X5 : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Dependen  Y : Belanja Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>3. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>4. Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>5. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>6. Terjadinya <i>Flypaper Effect</i> Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.</li> </ol>
7.	Solikin (2016)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada pengujian pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Pemerintah	<p>Independen  X1 : Dana Alokasi Umum  X2 : Pendapatan Asli Daerah  X3 : SiLPA</p> <p>Dependen  Y : Belanja Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini menyimpulkan baik secara parsial maupun simultan variabel independen PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</li> <li>2. Pada periode 2012 hingga 2014 telah</li> </ol>



No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Daerah di Indonesia (Studi tahun 2012-2014)		terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Terjadinya <i>Flypaper Effect</i> menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia lebih bergantung pada dana transfer dalam memenuhi pengeluarannya daripada ter hadap pendapatan asli daerah.
8.	Marici, Bastian dan Taqi (2022)	<i>Flypaper Effect</i> pada pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah (Studi pada Kabupaten Lebak dan Pandeglang Provinsi Banten periode 2014-2019)	Independen X1 : Dana Perimbangan X2 : Pendapatan Asli Daerah X3 : SILPA  Dependen Y : Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah</li> <li>2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah</li> <li>3. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.</li> <li>4. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.</li> <li>5. SILPA tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.</li> <li>6. Terjadi <i>Flypaper Effect</i> terhadap Belanja Daerah.</li> </ol>
9.	Indrasari dan Kholvieyana (2021)	<i>Flypaper Effect</i> Dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Khususnya Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Independen X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Pemerintah Daerah di Provinsi Riau mengalami <i>Flypaper Effect</i>.</li> </ol>

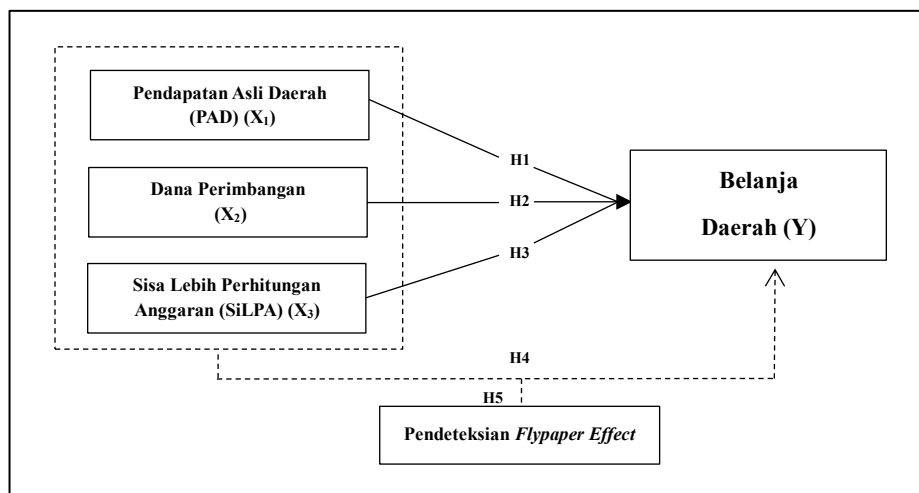
No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Dependen : Y : Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.</li> <li>3. Dana alokasi umum lebih mempengaruhi belanja daerah dibandingkan dengan Pendapatan asli daerah. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Kab/Kota di Provinsi Riau periode tahun 2017-2019</li> <li>4. Tdak terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada pemerintah Provinsi Riau.</li> </ol>
10.	Solicha dan Hanifa (2024)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Nusa Tenggara Timur	Independen X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus  Dependen : Y : Belanja Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.</li> <li>2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.</li> <li>3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.</li> <li>4. Secara simultan PAD, DAU dan Dak berpengaruh terhadap belanja daerah serta tidak ditemukan <i>Flypaper Effect</i>.</li> </ol>

Sumber: Data yang diolah, 2025.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran teoritis dapat ditunjukkan oleh gambar 2.1.



Sumber : Data yang diolah, 2025.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

—————▶ : Pengaruh secara parsial

-----▶ : Pengaruh secara simultan

## 2.4 Pengembahangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dapat dikatakan sementara, karena jawaban hanya didasarkan pada teori yang relevan, bukan di dasarkan pada faktor faktor empiris yang di peroleh dari pengumpulan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut Halim (2019), Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri dan mencerminkan kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah. Ketika PAD meningkat, pemerintah

daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai belanja daerah, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal.

Hal ini sejalan dengan Solikin (2016), menyatakan bahwa Semakin besar hasil PAD yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Menurut Putri dkk. (2024), Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri secara finansial dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan belanja daerah, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal, untuk mendukung pengembangan program dan proyek daerah tanpa ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan Fadilah & Helmayunita (2020), Fibriani (2018), Melda & Syofyan (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, di karenakan hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.**

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana perimbangan menjadi sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah yang akan dikeluarkan, Aminus (2018). Peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah dapat mendorong peningkatan belanja daerah sesuai dengan prioritas dan

kebutuhan masing-masing daerah, serta dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui optimalisasi belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan Yuliana & Asmara (2024) dan Alfatika & Susilowati (2022) menunjukkan bahwa, Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah hal ini dikarenakan, Semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar pula belanja daerah yang akan dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.**

#### **2.4.3 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran yang menjadi bagian dari pembiayaan pada tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai kembali kegiatan yang belum terlaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa SiLPA berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah, baik untuk belanja barang dan jasa maupun untuk kegiatan lainnya yang tertunda pada tahun anggaran sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan Solikin (2016) menunjukkan bahwa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, dikarenakan menunjukkan bahwa salah satu sumber pembiayaan belanja daerah berasal dari SiLPA sebagai salah satu komponen penerimaan pembiayaan daerah dalam struktur APBD. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H3 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.**

#### **2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah secara simultan**

PAD menjadi indikator utama dalam kemandirian fiskal pemerintah daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah secara mandiri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Peningkatan dana perimbangan akan menambah kapasitas fiskal daerah dan secara langsung dan mendorong peningkatan belanja daerah. Sebaliknya, penurunan DAU dapat berdampak pada terbatasnya ruang fiskal dalam pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan kembali pada tahun berikutnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, SiLPA dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum terlaksana. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

**H4 : PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah**

#### **2.4.5 *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera**

*Flypaper Effect* adalah fenomena di suatu kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat daripada pendapatan asli dari daerahnya sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah. Koefisien dana perimbangan lebih besar dibandingkan dengan koefisien Pendapatan Asli Daerah menunjukkan terjadi *Flypaper Effect* pada belanja daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Suharlina (2018) menunjukkan bahwa terjadi *Flypaper Effect* dengan koefisien DAU dan DAK lebih besar dibandingkan dengan koefisien PAD terhadap belanja daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah:

**H5 : Terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, dimana data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian yang tepat, kemudian data dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Sisa Lebih Peungukuran Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kota di Pulau Sumatera periode 2019-2023. Data diperoleh dari *website* resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini dimulai pada Bulan Februari 2025 sampai dengan Juli 2025.

#### **3.3 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah sebuah karakteristik yang terdapat pada individu, objek, atau kegiatan yang telah ditetapkan variasinya oleh peneliti untuk diamati kemudian diambil kesimpulan Sugiyono (2018) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis variabel sebagai berikut :

1. Variabel dependen adalah atau variabel terikat merupakan variabel yang dijadikan sebagai akibat atau variabel yang dipengaruhi karena ada variabel bebas Sugiyono (2018). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah (Y).
2. Menurut Sugiyono (2018), Variabel independen disebut juga dengan variabel tidak terikat atau variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel dependen

yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ) dan SiLPA ( $X_3$ ).

Operasionalisasi variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, disajikan pada tabel 3.1.

**Tabel 3. 1**  
**Operasional Variabel**

<b>Jenis Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator Pengukuran</b>	<b>Skala</b>
Pendapatan Asli Daerah	UU No. 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada LKPD kota di pulau Sumatera periode 2019-2023.	Rasio
Dana Perimbangan	UU No. 1 Tahun 2022, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Realisasi Dana Perimbangan pada LKPD kota di pulau Sumatera periode 2019-2023.	Rasio
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	PP No.12 Tahun 2019, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.	Realisasi SiLPA pada LKPD kota di pulau Sumatera periode 2019-2023.	Rasio
Belanja Daerah	UU No. 23 Tahun 2014, Belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.	Realisasi Belanja Daerah pada LKPD kota di pulau Sumatera periode 2019-2023.	Rasio

*Sumber:* Data yang diolah, 2025.



### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi merupakan bidang generalisasi termasuk objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2018). Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera periode 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kota di Pulau Sumatera terdiri atas 34 Kota.

**Tabel 3. 2**  
**Populasi**

No.	Kota	Provinsi
1.	Banda Aceh	Nanggroe Aceh Darussalam
2.	Langsa	
3.	Lhokseumawe	
4.	Sabang	
5.	Subulussalam	
6.	Binjai	Sumatera Utara
7.	Gunungsitoli	
8.	Medan	
9.	Padangsidempuan	
10.	Pematangsiantar	
11.	Sibolga	
12.	Tanjungbalai	
13.	Tebing Tinggi	Sumatera Barat
14.	Bukittinggi	
15.	Padang	
16.	Padang Panjang	
17.	Pariaman	
18.	Payakumbuh	
19.	Sawahlunto	
20.	Solok	Riau
21.	Dumai	
22.	Pekanbaru	Kepulauan Riau
23.	Batam	
24.	Tanjungpinang	Sumatera Selatan
25.	Lubuk Linggau	
26.	Pagaralam	
27.	Palembang	
28.	Prabumulih	Kepulauan Bangka Belitung
29.	Pangkalpinang	
30.	Bengkulu	Bengkulu

No.	Kota	Provinsi
31.	Jambi	Jambi
32.	Sungai Penuh	
33.	Bandar Lampung	Lampung
34.	Metro	

Sumber: Data yang diolah, 2025.

### 3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dari populasi berdasarkan kriteria/pertimbangan tertentu. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan suatu kriteria pada pemerintah kota Pulau Sumatera yang terdiri dari 34 kota dan setelah dilakukan perhitungan antara koefisien PAD dan Dana Perimbangan, ditemukan sebanyak 28 kota yang memiliki hasil  $< 1$ , yang artinya sebanyak 28 kota tersebut mengalami *Flypaper Effect*. Oleh karena itu, analisis lanjutan dalam penelitian ini difokuskan pada 28 kota tersebut sebagai sampel penelitian. Kriteria pemerintah kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Kriteria Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah
Jumlah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera	34
Jumlah Kota yang tidak mengalami <i>Flypaper Effect</i>	(6)
Jumlah sampel	28
Jumlah tahun penelitian	5
<b>Total unit analisis</b>	<b>140</b>

Sumber: Data yang diolah, 2025.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung menyediakan informasi kepada pihak yang melakukan pengumpulan data, Sugiyono (2018). Sebaliknya, sumber sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi secara tidak langsung kepada pengumpul data. Sumber

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), kuisisioner (angket) dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan seluruh data sekunder mengenai Laporan Realisasi Anggaran yang diperlukan dalam penelitian berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tertera di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019-2023 atas laporan keuangan pemerintah Kota di Pulau Sumatera yang didapatkan dari website resmi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yaitu <https://www.bpk.go.id/>.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai untuk mengetahui *Flypaper Effect* pada PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap belanja daerah dengan menggunakan analisis regresi terhadap variabel dependen, kemudian melakukan uji hipotesis (uji t dan uji f) yang digunakan untuk mengetahui taraf signifikan variabel independen terhadap variabel dependen kemudian menarik suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data panel yang dianalisis menggunakan uji deskriptif, uji model regresi data panel, uji klasik serta uji hipotesis. Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini maka digunakan aplikasi untuk mempermudah pengolahan data yaitu aplikasi *Econometric Views (Eviews)*.

#### **3.6.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, Sugiyono (2018). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* yang menggambarkan kemencengan distribusi data.

### 3.6.2 Analisis Regresi Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, merupakan gabungan antara data silang (*cross section*), data runtut waktu (*time series*). Data silang merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa objek pada waktu yang sama atau dalam satu periode tertentu. Sementara itu, data runtut waktu adalah data yang diperoleh dari satu objek yang diamati secara berkelanjutan dalam beberapa periode waktu. Dalam regresi data panel terdapat 3 pendekatan utama yaitu, *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), Caraka & Yasin (2017). Berikut ini penjelasannya:

#### 1. *Common Effect Model* (CEM)

Menurut Basuki (2021), *Common Effect Model* (CEM) adalah model paling sederhana dalam analisis data panel karena menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross-section*). Ghozali (2017), menyatakan bahwa model ini tidak memperhatikan perbedaan waktu maupun objek dalam data, sehingga diasumsikan bahwa seluruh unit data memiliki perilaku yang sama. Estimasi model ini dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), yaitu teknik regresi paling dasar yang tidak membutuhkan penyesuaian khusus terhadap variasi waktu maupun antar objek (Basuki, 2021).

#### 2. *Fixed Effect Model* (FEM)

*Fixed Effect Model* (FEM) mengasumsikan bahwa setiap unit analisis, seperti pemerintah kota, memiliki karakteristik unik yang tetap selama periode penelitian. Model ini menangkap perbedaan antar daerah dengan memberikan intersep yang berbeda untuk masing-masing unit, biasanya dengan bantuan variabel dummy. FEM cocok digunakan jika data menunjukkan perbedaan nyata antar daerah, Ghozali (2018).

#### 3. *Random Effect Model* (REM)

*Random Effect Model* (REM) digunakan untuk menganalisis data panel dengan anggapan bahwa perbedaan antar unit maupun antar waktu bersifat acak dan tidak saling bergantung, Basuki (2021). Model ini memperhitungkan adanya komponen kesalahan (*error*) yang berbeda untuk setiap individu atau entitas, baik

antar daerah maupun antar waktu. Salah satu kelebihan REM adalah kemampuannya dalam mengurangi masalah heteroskedastisitas. Estimasi model ini dilakukan dengan metode *Generalized Least Square* (GLS), sehingga REM juga dikenal sebagai *Error Component Model* (ECM), Caraka & Yasin (2017).

### 3.6.3 Uji Model Regresi Data Panel

Terdapat tiga jenis utama yang digunakan untuk mengolah dat apanel yaitu Uji *Chow* (*Chow Test*), Uji *Hausman* (*Hausman Test*) dan Uji *Lagrange Multiplier* (*Langrange Multiplier Test*)

#### 3.6.3.1 Uji *Chow* (*Chow Test*)

Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui model mana yang lebih baik dengan membandingkan nilai probabilitas dari masing-masing model. Nilai probabilitas tersebut kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya sebesar 0,05. Menurut Sugiyanto (2022) keputusan dalam memilih model ditentukan sebagai berikut:

1. Jika nilai Probabilitas untuk *cross section*  $F > \alpha$  (0,05), maka model yang lebih tepat adalah *Common Effect Model*.
2. Jika nilai Probabilitas untuk *cross section*  $F < \alpha$  (0,05), maka model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect Model*.

#### 3.6.3.2 Uji *Hausman* (*Hausman Test*)

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Uji ini membandingkan nilai probabilitas dari kedua model tersebut untuk menentukan mana yang paling sesuai. Berdasarkan Sugiyanto (2022) pengambilan keputusan dilakukan sebagai berikut:

1. Jika nilai Probabilitas untuk *cross section random*  $> \alpha$  (0,05), maka model yang lebih sesuai adalah *Random Effect Model*.
2. Jika nilai Probabilitas untuk *cross section random*  $< \alpha$  (0,05), maka model yang lebih sesuai adalah *Fixed Effect Model*.

### 3.6.3.3 Uji Lagrange Multiplier (*Lagrange Multiplier Test*)

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih antara *Random Effect Model* dan *Common Effect Model*. Uji ini dilakukan jika hasil dari Uji *Chow* dan Uji *Hausman* tidak menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model*, sehingga *Lagrange Multiplier Test* menjadi pilihan. Nilai hasil uji LM (*Lagrange Multiplier*) dibandingkan dengan nilai tabel *Chi-Squared* pada derajat kebebasan yang sesuai (jumlah variabel bebas) dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Keputusan pemilihan model dilakukan dengan ketentuan:

1. Jika nilai LM hitung  $>$  *Chi-Squared*, maka model terbaik adalah *Random Effect Model*.
2. Jika nilai LM hitung  $<$  *Chi-Squared*, maka model terbaik adalah *Common Effect Model*.

### 3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memiliki fungsi untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam data suatu penelitian sebelum dilakukannya analisis regresi linier berganda terhadap data tersebut. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah :

1. Uji normalitas
2. Uji multikolonieritas
3. Uji autokorelasi
4. Uji heteroskedastisitas

#### 3.6.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, Ghazali (2018). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normalitas *Jarque-Bera*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Jarque-Bera* sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas  $>$ 0,05 maka data tersebut terdistribusi secara normal.
2. Jika nilai probabilitas  $<$ 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

### 3.6.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan linier antara variabel independen. Regresi data panel yang baik jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi. Namun apabila terdapat korelasi antar variabel maka dapat mengganggu hubungan variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat *Centered Varians Inflation Factors* (VIF), apabila  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas, Sugiyanto (2022).

### 3.6.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi residual periode pengamatan dengan pengamatan sebelumnya, melalui deteksi Durbin Watson. Kriteria uji DW adalah apabila nilai  $DW > DU$  dan  $(4-DU) > DU$  atau  $DW < (4-DU)$ , maka dinyatakan tidak terdapat autokorelasi, Sugiyanto (2022).

### 3.6.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tersebut terdapat ketidaksamaan variabel dengan residual satu pengamat yang lain. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai *Obs\*R-Squared* mempunyai nilai probabilitas *chi-square*  $> 0,05$  dan sebaliknya, Ghozali & Ratmono (2017).

### 3.6.5 Analisis Model Terpilih

Metode ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, Ghozali (2018). Analisis ini digunakan untuk memahami bagaimana variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Persamaan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Belanja Daerah

X<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> : Dana Perimbangan

X<sub>3</sub> : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

- a : Konstanta  
b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>: Koefisien regresi  
e : *error*

### 3.6.6 Uji Hipotesis

#### 3.6.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan alat untuk mengukur seberapa baik dibangunnya model persamaan regresi, Ghozali (2018). Tolak ukur baik tidaknya model ditentukan oleh seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai dengan 1, semakin besarnya nilai koefisien determinasi maka model persamaan regresi yang dibangun semakin baik.

#### 3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, Ghozali (2018). Pengujian simultan ini menggunakan uji F dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F sebagai berikut:

1. Menentukan signifikansi
  - b. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  ( $\text{sig} \leq \alpha$ ), artinya signifikan.
  - c. Jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$  ( $\text{sig} \geq \alpha$ ), artinya tidak signifikan.
2. Membuat Kesimpulan
  - a. Jika  $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
  - b. Jika  $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.



### 3.6.5.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Kriteria dalam pengambilan keputusan uji t sebagai berikut:

1. Menentukan signifikansi
  - a. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  ( $\text{sig} \leq \alpha$ ), artinya signifikan.
  - b. Jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$  ( $\text{sig} \geq \alpha$ ), artinya tidak signifikan.
2. Membuat Kesimpulan
  - a. Jika  $T\text{-hitung} \leq T\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
  - b. Jika  $T\text{-hitung} \geq T\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.6.7 Pendeteksian *Flypaper Effect*

*Flypaper Effect* terjadi apabila perbandingan koefisien regresi PAD terhadap dana perimbangan  $> 1$  maka kondisi ini mengindikasikan tidak terjadinya *Flypaper Effect*, namun apabila perbandingan koefisien PAD terhadap dana perimbangan  $< 1$  maka kondisi ini mengindikasikan terjadinya *Flypaper Effect*.

$$\text{Flypaper Effect} = \frac{\text{Koefisien Regresi PAD}}{\text{Koefisien Regresi Dana Perimbangan}}$$

Sumber: Jesica & Satrianto (2019)

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Analisis Variabel

Setelah dilakukan pengumpulan dan pemrosesan data maka dapat diketahui deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3), sedangkan variabel dependen pada penelitian ini yaitu Belanja Daerah (Y).

Berikut adalah tren mengenai masing-masing variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023.



Sumber : BPK RI (data diolah), 2025.

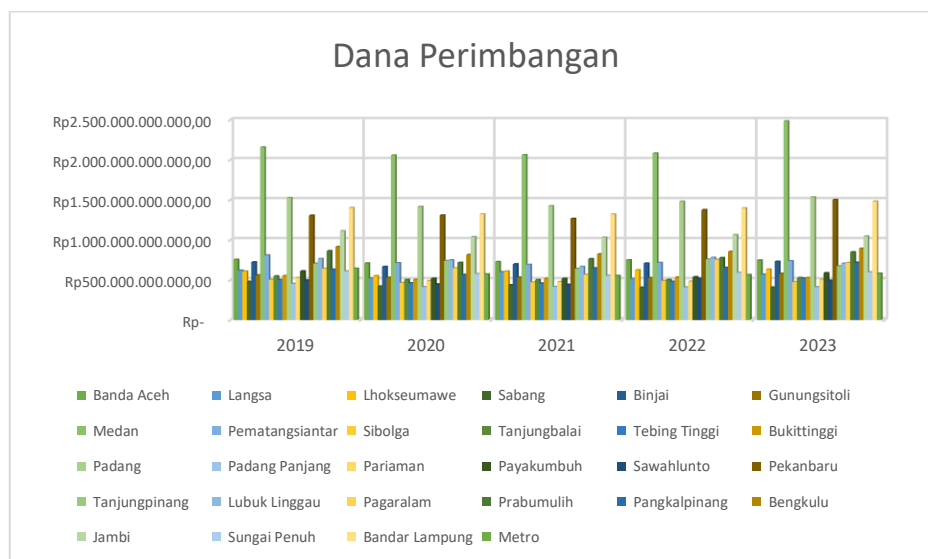
**Gambar 4. 1**

#### **Trend Pendapatan Asli Daerah Kota di Pulau Sumatera**

Berdasarkan hasil penjelasan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa :

1. Tahun 2019, jumlah penerimaan PAD tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total PAD sebesar Rp1.829.665.882.248 dan penerimaan PAD terendah diperoleh dari Kota Gunungsitoli dengan total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp32.209.121.388,86.

2. Tahun 2020, jumlah penerimaan PAD tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.509.483.588.167,01 dan penerimaan PAD terendah diperoleh dari Kota Gunungsitoli dengan total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp25.530.252.953,37.
3. Tahun 2021, jumlah penerimaan PAD tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.906.512.189.047,29 dan penerimaan PAD terendah diperoleh dari Kota Gunungsitoli dengan total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp21.417.950.730,57.
4. Tahun 2022, jumlah penerimaan PAD tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.230.554.495.746,85 dan penerimaan PAD terendah diperoleh dari Kota Gunungsitoli dengan total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp25.231.747.566,24.
5. Tahun 2023, jumlah penerimaan PAD tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.442.782.479.668,50 dan penerimaan PAD terendah diperoleh dari Kota Gunungsitoli dengan total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp27.398.988.049,08.



Sumber : BPK RI (data diolah), 2025.

**Gambar 4. 2**

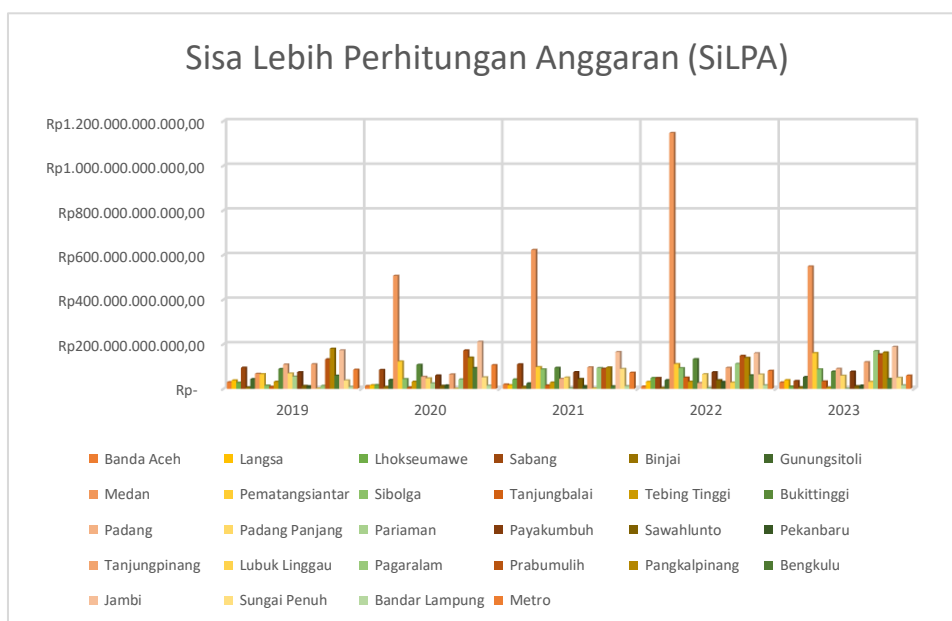
### **Trend Dana Perimbangan Kota di Pulau Sumatera**

Berdasarkan hasil penjelasan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa :

1. Tahun 2019, jumlah penerimaan Dana Perimbangan tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Dana Perimbangan sebesar Rp2.156.807.334.247,00 dan penerimaan Dana Perimbangan terendah diperoleh dari Kota Padang Panjang dengan Dana Perimbangan sebesar Rp453.085.922.598,00.
2. Tahun 2020, jumlah penerimaan Dana Perimbangan tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Dana Perimbangan sebesar Rp2.056.223.073.978,00 dan penerimaan Dana Perimbangan terendah diperoleh dari Kota Padang Panjang dengan total Dana Perimbangan sebesar Rp412.707.888.054,00.
3. Tahun 2021, jumlah penerimaan Dana Perimbangan tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Dana Perimbangan sebesar Rp2.059.980.280.796,00 dan penerimaan Dana Perimbangan terendah diperoleh dari Kota Padang Panjang dengan total Dana Perimbangan sebesar Rp415.237.079.204,00.
4. Tahun 2022, jumlah penerimaan Dana Perimbangan tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Dana Perimbangan sebesar

Rp2.081.057.959.879 dan penerimaan Dana Perimbangan terendah diperoleh dari Kota Sabang dengan total Dana Perimbangan sebesar Rp405.284.977.079.

5. Tahun 2023, jumlah penerimaan Dana Perimbangan tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Dana Perimbangan sebesar Rp2.482.957.621.792 dan penerimaan Dana Perimbangan terendah diperoleh dari Kota Sabang dengan total Dana Perimbangan sebesar Rp407.684.536.036.



Sumber : BPK RI (data diolah), 2025.

**Gambar 4.3**

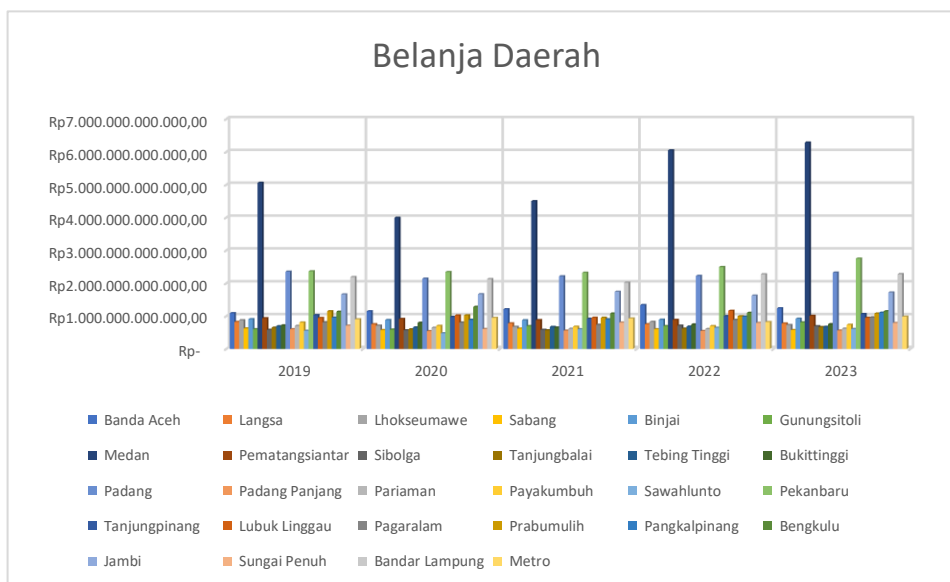
### **Trend Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota di Pulau Sumatera**

Berdasarkan hasil penjelasan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa :

1. Tahun 2019, jumlah penerimaan SiLPA tertinggi diperoleh dari Kota Pangkalpinang dengan total SiLPA sebesar Rp179.832.042.244,05 dan penerimaan SiLPA terendah diperoleh dari Kota Lubuk Linggau dengan SiLPA sebesar Rp1.323.361.131,28.
2. Tahun 2020, jumlah penerimaan SiLPA tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total SiLPA sebesar Rp506.651.260.365,37 dan penerimaan SiLPA terendah diperoleh dari Kota Lubuk Linggau dengan

total SiLPA sebesar Rp832.396.092,82.

3. Tahun 2021, jumlah penerimaan SiLPA tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total SiLPA sebesar Rp622.661.218.417,83 dan penerimaan SiLPA terendah diperoleh dari Kota Lubuk Linggau dengan total SiLPA sebesar Rp2.146.265.697,64.
4. Tahun 2022, jumlah penerimaan SiLPA tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total SiLPA sebesar Rp1.146.596.420.714,25 dan penerimaan SiLPA terendah diperoleh dari Kota Pariaman dengan total SiLPA sebesar Rp2.796.010.933,44.
5. Tahun 2023, jumlah penerimaan SiLPA tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total SiLPA sebesar Rp548.544.830.563,08 dan penerimaan SiLPA terendah diperoleh dari Kota Pariaman dengan total SiLPA sebesar Rp718.418.400,47.



Sumber : BPK RI (data diolah), 2025.

#### Gambar 4. 4

#### Trend Belanja Daerah Kota di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penjelasan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa :

1. Tahun 2019, jumlah penerimaan Belanja Daerah tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Belanja Daerah sebesar Rp5.059.288.700.981,01 dan penerimaan Belanja Daerah terendah diperoleh dari Kota Sawahlunto dengan Belanja Daerah sebesar

Rp551.743.879.687,01.

2. Tahun 2020, jumlah penerimaan Belanja Daerah tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Belanja Daerah sebesar Rp3.991.453.349.313,55 dan penerimaan Belanja Daerah terendah diperoleh dari Kota Sawahlunto dengan total Belanja Daerah sebesar Rp476.891.824.080,79.
3. Tahun 2021, jumlah penerimaan Belanja Daerah tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Belanja Daerah sebesar Rp4.499.145.144.311,87 dan penerimaan Belanja Daerah terendah diperoleh dari Kota Padang Panjang dengan total Belanja Daerah sebesar Rp555.719.900.371,67.
4. Tahun 2022, jumlah penerimaan Belanja Daerah tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Belanja Daerah sebesar Rp6.047.219.172.842,00 dan penerimaan Belanja Daerah terendah diperoleh dari Kota Padang Panjang dengan total Belanja Daerah sebesar Rp545.209.090.060,57.
5. Tahun 2023, jumlah penerimaan Belanja Daerah tertinggi diperoleh dari Kota Medan dengan total Belanja Daerah sebesar Rp6.282.441.543.317,28 dan penerimaan Belanja Daerah terendah diperoleh dari Kota Padang Panjang dengan total Belanja Daerah sebesar Rp560.604.099.846,51.

#### **4.1.2 Uji Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2018), Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* yang menggambarkan kemencengan distribusi data. Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	Y	X1	X2	X3
Mean	27.59842	25.62586	27.26144	24.45277
Median	27.49568	25.42850	27.16394	24.63633
Maximum	29.46878	28.52416	28.54047	27.76782
Minimum	26.89056	23.78750	26.72786	20.39256
Std. Dev.	0.521507	0.971567	0.402974	1.239524
Skewness	1.508215	0.859034	1.180231	-0.660276
Kurtosis	5.087070	3.548613	3.806190	4.050788
Jarque-Bera Probability	78.48585 0.000000	18.97428 0.000076	36.29337 0.000000	16.61343 0.000247
Sum	3863.779	3587.620	3816.602	3423.387
Sum Sq. Dev.	37.80370	131.2079	22.57199	213.5624
Observations	140	140	140	140

*Sumber* : Data diolah dengan *Eviews 12*, 2025.

Berdasarkan tabel 4.1 memberikan penjelasan mengenai statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian yang sudah ditransformasikan menggunakan Logaritma Natural (LN). Hasil yang ditunjukkan tabel 4.1 diperoleh hasil statistik deskriptif dengan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai standar deviasi sebagai berikut:

1. Variabel Belanja Daerah (Y) memiliki nilai minimum 26,89056 diperoleh dari belanja daerah kota Sawahlunto tahun 2020, sedangkan nilai maksimum 29,46878 diperoleh dari kota Medan pada tahun 2023. Nilai rata-rata (*mean*) Belanja Daerah sebesar 27,59842 . Sedangkan nilai simpangan (*standard deviation*) sebesar 0,521507 dengan jumlah sampel sebanyak 28 kota di Pulau Sumatera dan jumlah data sebanyak 140, dalam kurun waktu 5 tahun.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai minimum 23,78750 diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah kota Gunungsitoli tahun 2021, sedangkan nilai maksimum 28,52416 diperoleh dari kota Medan pada tahun 2023. Nilai rata-rata (*mean*) Pendapatan Asli Daerah sebesar 25,62586. Sedangkan nilai simpangan (*standard deviation*) sebesar 0,971567 dengan jumlah sampel sebanyak 28 kota di Pulau Sumatera dan jumlah data sebanyak 140, dalam kurun waktu 5 tahun.
3. Variabel Dana Perimbangan (X2) memiliki nilai minimum 26,72786 diperoleh



dari Dana Perimbangan kota Sabang tahun 2022, sedangkan nilai maksimum 28,54047 diperoleh dari kota Medan pada tahun 2023. Nilai rata-rata (*mean*) Dana Perimbangan sebesar 27,26144. Sedangkan nilai simpangan (*standard deviation*) sebesar 0,402974 dengan jumlah sampel sebanyak 28 kota di Pulau Sumatera dan jumlah data sebanyak 140, dalam kurun waktu 5 tahun.

4. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3) memiliki nilai minimum 20,39256 diperoleh dari kota Pariaman tahun 2023, sedangkan nilai maksimum 27,76782 diperoleh dari kota Medan pada tahun 2023. Nilai rata-rata (*mean*) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 24,45277. Sedangkan nilai simpangan (*standard deviation*) sebesar 1,239524 dengan jumlah sampel sebanyak 28 kota di Pulau Sumatera dan jumlah data sebanyak 140, dalam kurun waktu 5 tahun.

#### 4.1.3 Uji Model Regresi Data Panel

Berdasarkan ketiga model estimasi regresi data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) maka akan dipilih model mana yang paling tepat untuk mengestimasi model persamaan regresi yang diinginkan dengan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*, Caraka & Yasin (2017).

##### 4.1.3.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Menurut Sugiyanto (2022) keputusan dalam memilih model ditentukan sebagai berikut:

1. Jika nilai Probabilitas untuk *cross section*  $F > \alpha$  (0,05), maka model yang lebih tepat adalah *Common Effect Model*.
2. Jika nilai Probabilitas untuk *cross section*  $F < \alpha$  (0,05), maka model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect Model*.

**Tabel 4. 2**  
**Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: MODE\_FEM  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.943238	(27,109)	0.0000
Cross-section Chi-square	95.404660	27	0.0000

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025.

Hasil dari uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section F sebesar  $0.0000 < 0,05$ . Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah ***Fixed Effect Model (FEM)***.

#### 4.1.3.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berdasarkan Sugiyanto (2022) pengambilan keputusan dilakukan sebagai berikut:

1. Jika nilai Probabilitas untuk *cross section random*  $> \alpha (0,05)$ , maka model yang lebih sesuai adalah *Random Effect Model*.
2. Jika nilai Probabilitas untuk *cross section random*  $< \alpha (0,05)$ , maka model yang lebih sesuai adalah *Fixed Effect Model*.

**Tabel 4. 3**  
**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: MODEL\_REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.725679	3	0.0332

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025.

Hasil dari uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section random sebesar  $0,0332 < 0,05$ . Dengan demikian, model yang paling tepat dalam mengestimasi persamaan regresi adalah ***Fixed Effect Model (FEM)***. Karena hasilnya sama, saat pengujian Chow model yang terbaik adalah FEM dan saat uji Hausman model yang terbaik adalah FEM. Maka tidak perlu dilakukan uji Lagrange Multiplier. Hasil uji pemilihan model dapat dilihat pada tabel 4.4

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Uji Pemilihan Model**

Uji Pemilihan Model	Hasil Uji Pemilihan Model
Uji Chow	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>
Uji Hausman	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>
<b>Model Terpilih</b>	<b><i>Fixed Effect Model (FEM)</i></b>

Sumber : Data diolah, 2025.

#### 4.1.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memiliki fungsi untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam data suatu penelitian sebelum dilakukannya analisis regresi linier berganda terhadap data tersebut. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah :

1. Uji normalitas
2. Uji multikolonieritas
3. Uji autokorelasi
4. Uji heteroskedastisitas

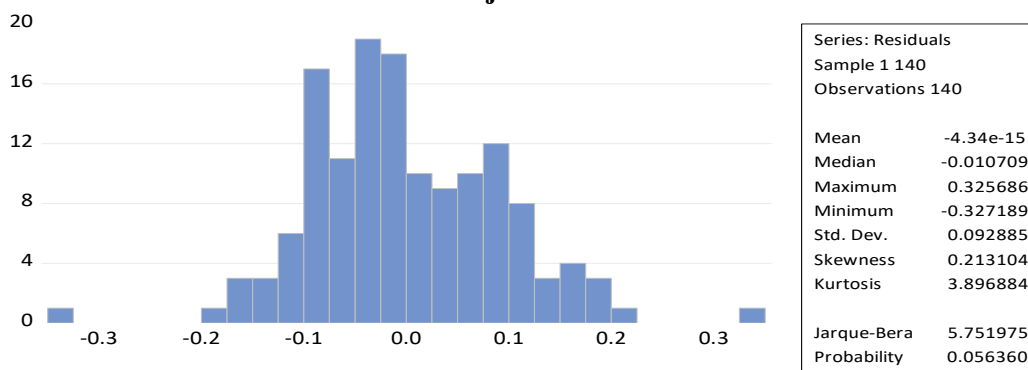
##### 4.1.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normalitas *Jarque-Bera*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Jarque-Bera* sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka data tersebut terdistribusi secara normal.
2. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Hasil uji normalitas *Jarque-Bera* dapat dilihat pada gambar 4.5.

**Gambar 4. 5**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Data diolah dengan *Eviews 12*, 2025.

Gambar 4.5 menunjukkan hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque- Bera (J-B) yaitu nilai probabilitas sebesar  $0,056360 > 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

#### 4.1.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan linier antara variabel independen. Regresi data panel yang baik jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi. Namun apabila terdapat korelasi antar variabel maka dapat mengganggu hubungan variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat Centered Varians Inflation Factors (VIF), apabila  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas, Sugiyanto (2022). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors  
Sample: 1 140

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.601050	9542.695	NA
X1	0.000293	3058.908	4.359356
X2	0.001640	19354.58	4.197915
X3	4.48E-05	426.7333	1.085902

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025.

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil dari pengujian data ini tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Nilai *Centered* dari Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 4.359356, variabel Dana Perimbangan (X2) sebesar 4.197915 dan variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3) yaitu 1.085902, semua variabel menunjukkan  $VIF < 10$ . Sehingga dapat disimpulkan dari hasil pengujian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

#### 4.1.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi residual periode pengamatan dengan pengamatan sebelumnya, melalui deteksi *Durbin Watson*. Kriteria uji DW adalah apabila nilai  $DW > DU$  dan  $(4-DU) > DU$  atau  $DW <$

$DW < (4-DU)$ , maka dinyatakan tidak terdapat autokorelasi, Sugiyanto (2022). Hasil Uji *Durbin Watson* ditunjukkan dalam tabel 4.8.

**Tabel 4. 6**  
**Hasil *Durbin- Watson***

R-squared	0.104673	Mean dependent var	3.91E-15
Adjusted R-squared	0.071265	S.D. dependent var	0.040339
S.E. of regression	0.038875	Akaike info criterion	-3.614994
Sum squared resid	0.202515	Schwarz criterion	-3.488924
Log likelihood	259.0496	Hannan-Quinn criter.	-3.563763
F-statistic	3.133204	Durbin-Watson stat	1.993161
Prob(F-statistic)	0.010450		

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025.

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji *Durbin-Watson* diperoleh DW sebesar 1,993161 nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin – Watson* (DW) dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05, jumlah pengamatan sampel 140 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3). Nilai DW berada diantara nilai dU dan 4-dU yaitu dU = 1,7678 dan 4-dU yaitu  $4 - 1,7678 = 2,2322$  atau  $1,7678 < 1,993161 < 2,2322$ . Sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah autokorelasi.

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

n	k	d <sub>U</sub>	4 – d <sub>U</sub>	DW	Kesimpulan
140	3	1,7678	2,2322	1,993161	Tidak ada autokorelasi

Sumber : Data diolah, 2025.

#### 4.1.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tersebut terdapat ketidaksamaan variabel dengan residual satu pengamat yang lain. Tidak terjadi heterokedastisitas jika nilai *Obs\*R-Squared* mempunyai nilai probabilitas *chi-square*  $> 0,05$  dan sebaliknya, Ghozali & Ratmono (2017). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.8.

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.520577	Prob. F(3,136)	0.0606
Obs*R-squared	7.374127	Prob. Chi-Square(3)	0.0609
Scaled explained SS	10.07937	Prob. Chi-Square(3)	0.0179

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025.

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa *Obs\*R-Squared* mempunyai nilai probabilitas *chi-square*  $0.0609 > 0,05$ . Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4.1.5 Analisis Model Terpilih

Berdasarkan metode estimasi regresi antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) serta pemilihan model estimasi persamaan regresi dengan uji *chow* dan uji *Hausman*, maka terpilihlah *Fixed Effect Model* (FEM) untuk persamaan regresi linear data panel. Hasil perhitungan disajikan pada tabel 4.9.

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/04/25 Time: 14:41  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 28  
Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.309458	3.220542	1.959129	0.0527
X1	0.156000	0.048690	3.203916	0.0018
X2	0.607841	0.120794	5.032065	0.0000
X3	0.029474	0.010148	2.904405	0.0045

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.065828	R-squared	0.983952
Mean dependent var	27.59842	Adjusted R-squared	0.979535
S.D. dependent var	0.521507	S.E. of regression	0.074604
Akaike info criterion	-2.160682	Sum squared resid	0.606668
Schwarz criterion	-1.509318	Log likelihood	182.2477
Hannan-Quinn criter.	-1.895987	F-statistic	222.7730
Durbin-Watson stat	2.257711	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025.

Model estimasi yang diperoleh dari *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 6,309458 + 0,156000 X_1 + 0,607841 X_2 + 0,029474 X_3 + e$$

Hasil dari persamaan di atas maka dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstansa ( $\alpha$ ) sebesar 6,309458 artinya apabila Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran bernilai 0, maka Belanja Daerah bernilai positif sebesar 6,309458.
2. Nilai koefisien regresi Variabel PAD ( $b_1$ ) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,156000, artinya bahwa setiap peningkatan PAD 1% maka dapat menyebabkan belanja daerah meningkat sebesar 0,156000.
3. Nilai koefisien regresi Variabel Dana Perimbangan ( $b_2$ ) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,607841, artinya bahwa setiap peningkatan Dana Perimbangan sebesar 1% maka dapat menyebabkan belanja daerah meningkat sebesar 0,607841.
4. Nilai koefisien regresi Variabel SiLPA ( $b_2$ ) menunjukkan nilai positif yaitu sebesar 0,029474, artinya bahwa setiap peningkatan SiLPA sebesar 1% maka dapat menyebabkan belanja daerah meningkat sebesar 0,029474.

#### 4.1.6 Uji Hipotesis

##### 4.1.6.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghazali (2018) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat untuk mengukur seberapa baik dibangunnya model persamaan regresi. Tolak ukur baik tidaknya model ditentukan oleh seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 sampai dengan 1. Uji koefisien determinasi *adjusted* ( $R^2$ ) dalam penelitian ini untuk mengetahui besaran nilai korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi ditunjukkan dalam tabel 4.10.

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/04/25 Time: 14:41  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 28  
Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.309458	3.220542	1.959129	0.0527
X1	0.156000	0.048690	3.203916	0.0018
X2	0.607841	0.120794	5.032065	0.0000
X3	0.029474	0.010148	2.904405	0.0045

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.065828	R-squared	0.983952
Mean dependent var	27.59842	Adjusted R-squared	0.979535
S.D. dependent var	0.521507	S.E. of regression	0.074604
Akaike info criterion	-2.160682	Sum squared resid	0.606668
Schwarz criterion	-1.509318	Log likelihood	182.2477
Hannan-Quinn criter.	-1.895987	F-statistic	222.7730
Durbin-Watson stat	2.257711	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 uji koefisien determinasi dengan nilai *adjusted* R<sup>2</sup> sebesar 0,979535 atau 97%. Hal ini berarti bahwa persentase variabel PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Belanja Daerah sebesar 97%, sedangkan sisanya sebesar 3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

#### 4.1.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, Ghozali (2018). Pengujian simultan ini menggunakan uji F dengan membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  ( $\text{sig} \leq \alpha$ ), artinya signifikan. Jika  $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$ , Artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



2. Jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$  ( $\text{sig} \geq \alpha$ ), artinya tidak signifikan. Jika F-hitung  $\geq$  F-tabel, Artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel 4.11.

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/04/25 Time: 14:41  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 28  
Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.309458	3.220542	1.959129	0.0527
X1	0.156000	0.048690	3.203916	0.0018
X2	0.607841	0.120794	5.032065	0.0000
X3	0.029474	0.010148	2.904405	0.0045

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.065828	R-squared	0.983952
Mean dependent var	27.59842	Adjusted R-squared	0.979535
S.D. dependent var	0.521507	S.E. of regression	0.074604
Akaike info criterion	-2.160682	Sum squared resid	0.606668
Schwarz criterion	-1.509318	Log likelihood	182.2477
Hannan-Quinn criter.	-1.895987	F-statistic	222.7730
Durbin-Watson stat	2.257711	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah dengan *Eviews 12*, 2025.

Berdasarkan tabel 4.11 yang diperoleh, F hitung 225,4932 dengan nilai probabilitas 0,000000. Nilai F tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3 dan df 2 (n-k-1) atau 140-3-1 = 136 hasil diperoleh untuk F-tabel yaitu sebesar 2,67. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung memiliki nilai yang lebih besar dari nilai F-tabel ( $222,7730 > 2,67$ ) maka  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan signifikasi pada uji F yaitu kurang dari 0,05 ( $0,000000 < 0,05$ ) maka  $H_1$  diterima, artinya PAD, DAU dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

### 4.1.6.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria dalam pengambilan keputusan uji t sebagai berikut:

3. Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  ( $\text{sig} \leq \alpha$ ), artinya signifikan. Jika T-hitung  $\leq$  T-tabel, Artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
4. Jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$  ( $\text{sig} \geq \alpha$ ), artinya tidak signifikan. Jika T-hitung  $\geq$  T-tabel, Artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji parsial (Uji T) dapat dilihat pada tabel 4.14.

**Tabel 4. 12**  
**Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/04/25 Time: 14:41				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 28				
Total panel (balanced) observations: 140				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.309458	3.220542	1.959129	0.0527
X1	0.156000	0.048690	3.203916	0.0018
X2	0.607841	0.120794	5.032065	0.0000
X3	0.029474	0.010148	2.904405	0.0045
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.065828	R-squared	0.983952	
Mean dependent var	27.59842	Adjusted R-squared	0.979535	
S.D. dependent var	0.521507	S.E. of regression	0.074604	
Akaike info criterion	-2.160682	Sum squared resid	0.606668	
Schwarz criterion	-1.509318	Log likelihood	182.2477	
Hannan-Quinn criter.	-1.895987	F-statistic	222.7730	
Durbin-Watson stat	2.257711	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025.

Jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  ( $\alpha$ ) atau thitung lebih besar ( $<$ ) ttabel pada taraf signifikasi 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  (uji 2 sisi) dengan  $df = n-k-1$  atau  $140-3-1=136$ , dan hasil yang diperoleh untuk t-tabel

sebesar 1,97756. Berdasarkan hasil pengujian parsial dari tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,203916. Hasil penelitian diperoleh ( $3,203916 > 1,97756$ ) dan nilai probabilitas (X1)  $0,0018 < 0,05$ . Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
2. Variabel Dana Perimbangan (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 5,032065. Hasil penelitian diperoleh t-hitung  $>$  t-tabel ( $5,032065 > 1,97756$ ) dan nilai probabilitas (X2)  $0,0000 < 0,05$ . Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
3. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,904405. Hasil penelitian diperoleh t-hitung  $>$  t-tabel ( $2,904405 > 1,97756$ ) dan nilai probabilitas (X3)  $0,0045 < 0,05$ . Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### 4.1.7 Pendeteksian *Flypaper Effect*

*Flypaper Effect* terjadi apabila perbandingan koefisien regresi PAD terhadap dana perimbangan  $>$  1 maka kondisi ini mengindikasikan tidak terjadinya *Flypaper Effect*, namun apabila perbandingan koefisien PAD terhadap dana perimbangan  $<$  1 maka kondisi ini mengindikasikan terjadinya *Flypaper Effect*.

**Tabel 4. 13**  
**Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/04/25 Time: 14:41  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 28  
Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.309458	3.220542	1.959129	0.0527
X1	0.156000	0.048690	3.203916	0.0018
X2	0.607841	0.120794	5.032065	0.0000
X3	0.029474	0.010148	2.904405	0.0045

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.065828	R-squared	0.983952
Mean dependent var	27.59842	Adjusted R-squared	0.979535
S.D. dependent var	0.521507	S.E. of regression	0.074604
Akaike info criterion	-2.160682	Sum squared resid	0.606668
Schwarz criterion	-1.509318	Log likelihood	182.2477
Hannan-Quinn criter.	-1.895987	F-statistic	222.7730
Durbin-Watson stat	2.257711	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan tabel 4.13 nilai koefisien PAD dan Dana Perimbangan dari masing-masing variabel 0,156000 dan 0,607841. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya *Flypaper Effect* pada belanja daerah ialah membagi nilai koefisien PAD dengan nilai koefisien Dana Perimbangan.

$$Flypaper\ Effect = \frac{Koefisien\ Regresi\ PAD}{Koefisien\ Regresi\ Dana\ Perimbangan} = \frac{0,156000}{0,607841} = 0,256$$

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan hasil model tersebut dengan membandingkan nilai koefisien regresi PAD dengan nilai koefisien Dana Perimbangan diperoleh hasil  $0,256 < 1$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota di Pulau Sumatera ditemukan adanya *Flypaper Effect* yang artinya bahwa Kota di Pulau Sumatera masih belum dikatakan mandiri.

## 4.2 Pembahasan

### 4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera tahun 2019- 2024. Hal tersebut ditunjukkan dari analisis variabel Pendapatan Asli Daerah yang diketahui memiliki nilai t hitung sebesar 3,203916. Nilai t hitung tersebut menunjukkan angka lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,97756 atau  $(3,203916 > 1, 97756)$  dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,0000 dimana hal ini menunjukkan bahwa  $0,0018 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Hasil ini menunjukkan bahwa naik turunnya PAD di suatu daerah dapat mempengaruhi belanja daerah. PAD digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah karena PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan pendapatan daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka dapat mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fibriani (2018), Wira & Dewi (2023), Fadilah & Helmayunita (2020), Cahyani dkk. (2024) dan Rafi & Arza (2023) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga, pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri karena sudah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri tanpa harus adanya ketergantungan pada pemerintah pusat. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrasari & Kholvieyana (2021), Khoerunnisa dkk. (2021), Wahyuni (2024), Handayani dkk. (2022) dan Marici dkk. (2022) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut.

Hasil ini didukung oleh data pada Kota Medan tahun 2023 yang memiliki PAD sebesar Rp 2.442.782.732.668,50, yang merupakan capaian tertinggi dari seluruh kota di Pulau Sumatera pada tahun tersebut. Tingginya realisasi PAD ini diikuti dengan Belanja Daerah yang juga sangat tinggi, yaitu sebesar Rp 6.282.441.543.317,28, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) Kota Medan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya penerimaan PAD memberikan kontribusi signifikan dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Temuan ini memperkuat bahwa belanja daerah cenderung meningkat ketika PAD meningkat.

Dalam teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976), pemerintah pusat berperan sebagai *principal* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah dapat menggunakan kewenangan secara efektif dan efisien dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan PAD terhadap belanja daerah, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* mampu menjalankan perannya sesuai dengan harapan pemerintah pusat sebagai *principal*. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan kemandirian fiskal yang baik, di mana pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengalokasikan anggaran belanja tanpa harus bergantung pada dana perimbangan.

#### **4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah**

Hasil penelitian dari hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera tahun 2019- 2023. Hal tersebut ditunjukkan dari analisis variabel Dana Perimbangan yang diketahui memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 5,032065. Nilai  $t$  hitung tersebut menunjukkan angka lebih besar dari  $t$  tabel yaitu sebesar 1,65613 atau ( $5,032065 > 1,97756$ ) dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,0000 dimana hal ini menunjukkan bahwa  $0,0000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Hal

ini menunjukkan bahwa ketika Dana Perimbangan mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Sehingga Pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan dan belum bisa mandiri terhadap dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah ditentukan berdasarkan kondisi keuangan daerah, daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah akan mendapatkan dana perimbangan yang relatif besar. Daerah dengan penerimaan Dana Perimbangan yang besar cenderung menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dapat mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal dan dapat memunculkan fenomena *Flypaper Effect*.

Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah pusat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja daerah, seperti penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang menjadi prioritas daerah. Penggunaan dana ini sangat penting untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, Pemerintah daerah perlu mengelola Dana Perimbangan secara efektif dan efisien dengan mengarahkan sebagian penggunaannya untuk mendanai program-program yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, pengelolaan dana perimbangan yang efektif dan berorientasi pada peningkatan PAD dapat mengurangi risiko terjadinya *Flypaper Effect*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Alfatika & Susilowati (2022), Yuliana & Asmara (2024), Marbun, Manalu, dkk. (2022), Aditama dkk. (2024) dan Cahyani dkk. (2024) yang menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini menunjukkan bahwa apabila dana perimbangan mengalami kenaikan, maka dapat menyebabkan kenaikan belanja daerah juga. Hal ini karena dana perimbangan dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan yang tercakup dalam belanja daerah. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Susan dkk. (2023), Rosaeni (2022), Susanti dkk. (2024), Sofiyani &

Subadriyah (2020) dan Sembel dkk (2018). yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini dikarenakan besar kecilnya penerimaan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Karena tidak sepenuhnya Belanja Daerah diambil dari Dana Perimbangan.

Hasil ini didukung oleh data pada Kota Medan pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar Rp 2.482.957.621.792,00. Dana ini merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan Dana Perimbangan tersebut diikuti dengan tingginya Belanja Daerah Kota Medan, yakni sebesar Rp 6.282.441.543.317,28, yang menunjukkan bahwa dana perimbangan dari pusat ikut berperan penting dalam mendorong peningkatan kapasitas belanja daerah.

Dalam teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976) pemerintah pusat berperan sebagai *principal* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah, termasuk Dana Perimbangan. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, Dana Perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat dengan harapan agar pemerintah daerah dapat menggunakannya secara efektif dan efisien dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* menjalankan perannya dalam mengelola dana dari pusat untuk memenuhi pengeluaran publik. Namun, pengaruh signifikan ini juga mencerminkan adanya ketergantungan fiskal, di mana belanja daerah lebih dipengaruhi oleh dana perimbangan daripada pendapatan yang diperoleh secara mandiri. Ketergantungan ini dapat menjadi tanda rendahnya kemandirian fiskal daerah dan membuka peluang terjadinya *Flypaper Effect*, yaitu kondisi ketika dana dari pusat lebih mendorong belanja dibandingkan PAD.

#### **4.3.3 Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah**

Hasil penelitian dari hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara parsial Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah



pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera tahun 2019-2024. Hal tersebut ditunjukkan dari analisis variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang diketahui memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 2,904405. Nilai  $t$  hitung tersebut menunjukkan angka lebih besar dari  $t$  tabel yaitu sebesar 1,97756 atau ( $2,904405 > 1,97756$ ) dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,0045 dimana hal ini menunjukkan bahwa  $0,0045 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan SiLPA diikuti dengan peningkatan Belanja Daerah. Hal ini terjadi karena sebagian besar SiLPA dialokasikan untuk belanja daerah yang berupa belanja modal serta dapat digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya. Salah satu sumber pembiayaan belanja daerah berasal dari SiLPA sebagai salah satu komponen penerimaan pembiayaan daerah dalam struktur APBD.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Solikin (2016), Mianto (2019), Wira & Dewi (2023), Rafi & Arza (2023) dan Nurhalisa dkk. (2020) yang menyatakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, hal ini menunjukkan bahwa salah satu sumber pembiayaan belanja daerah berasal dari SiLPA sebagai salah satu komponen penerimaan pembiayaan daerah dalam struktur APBD. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fibriani (2018), Marici dkk. (2022), dan Marbun, Putri Manalu, dkk. (2022) yang menyatakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, hal ini dikarenakan naiknya SiLPA belum tentu mempengaruhi terhadap naiknya belanja daerah. Sisa dana ini belum tentu pemerintah gunakan untuk menutupi langsung kekurangan belanja daerah.

Hasil ini juga didukung oleh data dari Kota Medan, di mana SiLPA pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 1.146.596.420.714,25, dan digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun 2022. Nilai ini merupakan yang tertinggi selama periode 2019-2023 dan menunjukkan bahwa masih terdapat anggaran yang belum

digunakan di tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA tersebut diikuti dengan peningkatan belanja daerah tahun 2022, yaitu sebesar Rp 6.047.219.172.842,00. Hal ini menggambarkan bahwa dana sisa dari tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan daerah, yang pada akhirnya mendorong peningkatan belanja.

Dalam teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976), pemerintah pusat bertindak sebagai *principal* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola dan mengoptimalkan seluruh sumber daya keuangan daerah, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dalam konteks pengelolaan anggaran, SiLPA mencerminkan efisiensi atau sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang dapat digunakan kembali untuk membiayai belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* mampu memanfaatkan dana sisa anggaran dalam mendukung pembiayaan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa SiLPA tidak hanya menjadi indikator efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dikelola secara efektif oleh pemerintah daerah.

#### **4.3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah secara Simultan**

Hasil penelitian dari hipotesis keempat menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera selama tahun 2019-2023. Hal tersebut ditunjukkan dari analisis variabel yang diketahui memiliki nilai F hitung sebesar 222,7730. Nilai F hitung tersebut menunjukkan angka lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,67 atau ( $222,7730 > 2,67$ ). Kemudian, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000000 dimana hal ini menunjukkan bahwa  $0,000000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima.

Berdasarkan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,979535. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Belanja Daerah sebesar 97%, Sementara sisanya sebesar 3% dijelaskan dan dipengaruhi oleh faktor lain di variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Ketiga variabel memiliki peran yang penting dalam mendorong kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran publik. PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonominya secara mandiri, Dana Perimbangan berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal dari pusat ke daerah, sedangkan SiLPA menunjukkan efisiensi pengelolaan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat dimanfaatkan kembali. Kombinasi ketiganya secara simultan mampu menjelaskan hampir seluruh variasi dalam Belanja Daerah, yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 97%, mengindikasikan bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan optimalisasi penggunaan SiLPA.

Dalam teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976), pemerintah pusat berperan sebagai *principal* yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah, termasuk PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, *principal* mengharapkan agent dapat menggunakan seluruh sumber pendapatan tersebut secara efektif untuk membiayai kebutuhan belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yang mencerminkan bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sebagai agent dan bertanggung jawab. Meskipun ketiga variabel tersebut berpengaruh,

dominasi Dana Perimbangan dan SiLPA tetap menunjukkan adanya potensi *Flypaper Effect*, yaitu kondisi di mana pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana perimbangan dari pusat dibandingkan dengan PAD. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

#### 4.3.5 *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil uji t nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya *Flypaper Effect* pada belanja daerah didapatkan nilai regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar 0,156000 dan 0,607841. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya *Flypaper Effect* pada belanja daerah dengan membagi nilai koefisien PAD dengan nilai koefisien Dana Perimbangan. Adapun nilai yang diperoleh ialah  $0,256 < 1$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota di Pulau Sumatera ditemukan adanya *Flypaper Effect*, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ketika mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, langsung digunakan untuk belanja daerah dibandingkan peningkatan PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran daerah lebih didorong oleh dana perimbangan dari pusat dibandingkan oleh pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan daerah. Fenomena *Flypaper Effect* menandakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi dalam membiayai Belanja Daerah. Fenomena *Flypaper Effect* memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan finansial dalam menjalankan roda pemerintahan mereka sendiri.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jesica & Satrianto (2019), Jannah (2020), Rafi & Arza (2023), Cahyani dkk. (2024) dan Indrasari & Kholviyana (2021) yang menyatakan bahwa terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada DAU, DAK, SILPA, dan PAD terhadap Belanja Daerah, hal ini dikarenakan pada DAU, DAK, SILPA, dan PAD terhadap Belanja Daerah. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Fibriani (2018),

Sembel dkk. (2018), Wira & Dewi (2023), Marici dkk. (2022) dan Aditama dkk. (2024) yang menyatakan bahwa tidak terjadinya *Flypaper Effect*, dikarenakan nilai PAD lebih tinggi daripada DAU, sehingga daerah ini tidak memiliki pola ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

*Flypaper Effect* dapat menimbulkan berbagai dampak pada belanja daerah yang pertama dapat menyebabkan celah fiskal, karena dana perimbangan seharusnya digunakan untuk menutup selisih antara kebutuhan belanja daerah dan potensi pendapatan yang bisa digali sendiri. Jika *Flypaper Effect* terjadi, artinya penggunaan dana perimbangan belum optimal. Kedua, dapat menimbulkan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat tetap tinggi, yang pada akhirnya membuat daerah sulit mandiri. Ketiga, dapat menyebabkan dana perimbangan yang digunakan secara berlebihan tanpa perencanaan dan evaluasi yang matang sehingga dapat mengakibatkan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mengarahkan pemanfaatan dana perimbangan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mengurangi potensi terjadinya *Flypaper Effect* di masa mendatang, Jannah (2020).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $3,203916 > 1,97756$  dan memiliki nilai probabilitas  $0,0018 < 0,05$ . Artinya, semakin tinggi PAD yang dihasilkan maka semakin meningkat pula Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $5,032065 > 1,97756$  dan memiliki nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Artinya, bahwa ketika Dana Perimbangan mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan meningkat.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $2,904405 > 1,97756$  dan memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,0045 < 0,05$ . Artinya, sebagian besar SiLPA dialokasikan untuk belanja daerah yang berupa belanja modal serta dapat digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang belum terealisasi pada tahun sebelumnya.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Dengan nilai  $f$  hitung sebesar  $222,7730 > 2,67$  dan memiliki nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ .
5. Terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Kota di Pulau Sumatera. Dengan koefisien PAD  $0,156000$  dan koefisien Dana Perimbangan  $0,607841$ , sehingga diperoleh nilai yaitu  $0,256 < 1$ .

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat membiayai kebutuhan daerahnya tanpa bergantung penuh kepada dana transfer dari pusat, sehingga daerah tersebut akan mampu untuk mandiri.
2. Pemerintah daerah sebaiknya dapat mengalokasikan Dana Perimbangan yang diterima sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah secara tepat dan efektif, serta memastikan bahwa penggunaannya benar-benar mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berkelanjutan, agar tidak terjadi pemborosan atau ketidaktepatan sasaran anggaran.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara optimal dengan meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih akurat, agar SiLPA dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
4. Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam mendanai belanja daerah, guna menyesuaikan kebijakan fiskal dan strategi pengelolaan keuangan dengan dinamika kebutuhan serta kondisi wilayah.
5. Terjadinya fenomena *Flypaper Effect*, belanja daerah lebih responsif terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dibandingkan PAD, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih cenderung bergantung pada dana pusat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas fiskal daerah agar kemandirian keuangan daerah dapat meningkat, serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, M. D. R., Zulkifli, & Dwitayanti, Y. (2024). *Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*. 8.
- Alfatika, I. N., & Susilowati. (2022). Analisis Belanja Daerah dan Fenomena Flypapereffect Pemerintah Kab/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(4), 553–568.
- Aminus, R. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir*.
- Cahyani, V. M., Firmansyah, & Dwiyantri, Y. (2024). *Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022*.
- Caraka, & Yasin, H. (2017). *Spatial Data Panel* (Team WADE Publish, Ed.).
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- Fibriani. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). 1–23.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EViews 10. Universitas Diponegoro.
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *SOROT*, 17(1), 41. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57>
- Indrasari, A., & Kholvieyana, R. (2021). *Flypaper Effect* Dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Khususnya Pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Dan Dana Alokasi Umum ( DAU ). 8(Juli), 1–13.
- Jannah, H. (2020). Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305–360.



- Jesica, D., & Satrianto, A. (2019). Analisis *Flypaper Effect* Dan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
- Khoerunnisa, A., Susetyo, B., & Fanani, B. (2021). Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasi 13(2), 43–53. [http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/8556%0Ahttp://repositori.unsil.ac.id/8556/8/9.BAB 2.pdf](http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/8556%0Ahttp://repositori.unsil.ac.id/8556/8/9.BAB%202.pdf)
- Marbun, S., Manalu, E. P., & Malau, Y. N. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 2684–7868. [www.bpssumsel.go.id](http://www.bpssumsel.go.id).
- Marbun, S., Putri Manalu, E., & Nelsari Malau, Y. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 19–30. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.14370>
- Marici, S., Bastian, E., & Taqi, M. (2022). *Flypaper Effect* pada Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Tirtayasa*, 07(01), 58–77.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.252>
- Nurhalisa, S., Patra, A. D., & Hamseng, J. (2020). Analisis pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap belanja Daerah. (*Doctoral dissertation* Universitas Muhammadiyah Palopo), August, 1–43.
- Nurhayati, & Wicaksono, A. (2017). Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Anggaran 2016.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Putri, A. A., Siboro, S. F., Safitri, E., & Aulia, N. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 64–74. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1901>
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis *Flypaper Effect* pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 411–427. <https://doi.org/10.24036/Jea.V5i1.649>

Rosaeni, I. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2010-2022)*. <https://kemenkeu.go.id>

Sari, E. T. I., & Asyik, N. F. (2017). PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(5), 1978–1994.

Sembel, A. M. A., Rumate, V., & Rotinsulu, D. (2018). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2016. 29.

Sofiyani, L., & Subadriyah. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah)*. <http://ejournal.unisnu.ac.id/jra/>

Solikin, A. (2016). Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Sisa Lebih Penghitungan Ang- Garan (Silpa) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 11–25.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Suharlina, H. (2018). *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP 2018 FEB Universitas Tanjungpura.*, 7, 101–110.

Susan, R. T., Dekrita, Y. A., & Sanga, K. P. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Keterjadian Flypaper Effect Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018-2022*. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5>.

Susanti, Wage, S., & Effendi, S. (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Indonesia*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Wahyuni, T. (2024). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.*

Wira, P. E. N., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Analisis *Flypaper Effect* pada Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2019-2021). 12(3).

Yuliana, A. S., & Asmara, K. (2024). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah.* 6.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar-Palembang 30139 Telp (0711)353414  
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El: [Info@polsri.ac.id](mailto:Info@polsri.ac.id)

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Msy. Nur Aisyah Putri  
NPM : 062140512619  
Kelas : 8 APC  
Mata Kuliah : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah,  
Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Di Pulau  
Sumatera  
Pembimbing Skripsi I : Sulaiman, S.E., M.M

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	8/4-2025	Pengajuan Judul	
2.	9/4-2025	ACC judul	
3.	11/4-2025	Pengajuan proposal	
4.	15/4-2025	Revisi proposal	
5.	22/4-2025	ACC proposal	
6.	19/5-2025	Pengajuan Bab 1-3	
7.	19/5-2025	Revisi Bab 1-3	
8.	18/6-2025	Pengajuan Bab 4-5 & ACC Bab 1-3	
9.	23/6-2025	Revisi Bab 4-5	
10.	7/7-2025	Perbaikan bab II	
11.	8/7-2025	ACC Bab 5 & keseluruhan	
12.			
13.			

Palembang, 2025  
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 197104121998022001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar-Palembang 30139 Telp (0711)353414  
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El: [Info@polsri.ac.id](mailto:Info@polsri.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Msy. Nur Aisyah Putri  
NPM : 062140512619  
Kelas : 8 APC  
Mata Kuliah : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik  
Judul Skripsi : Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah,  
Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Di Pulau  
Sumatera  
Pembimbing Skripsi II : Sri Hartaty, S.E., M.Si, Ak., CA

No.	Tanggal	Uraian Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	3/3-2025	Konsultasi Awal	
2.	10/3-2025	Pengajuan judul	
3.	15/3-2025	Acc judul	
4.	21/3-2025	Pengajuan Proposal	
5.	10/4-2025	Revisi Proposal	
6.	17/4-2025	Revisi Proposal	
7.	21/4-2025	Acc Proposal	
8.	13/5-2025	Pengajuan Bab 1-3	
9.	2/6-2025	Pengajuan Bab 4-5 dan Acc Bab 1-3	
10.	14/6-2025	Revisi Bab 4-5	
11.	23/6-2025	Revisi Bab 4-5	
12.	2/7-2025	Acc 4.5 dan keseluruhan	
13.			

Palembang, 2025  
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP 197104121998022001







KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar-Palembang 30139 Telp (0711)353414  
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El: [Info@polsri.ac.id](mailto:Info@polsri.ac.id)

**KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

**Pihak Pertama**

Nama : Msy. Nur Aisyah Putri  
NIM : 062140512619  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik

**Pihak Kedua**

Nama : Sulaiman, S.E., M.M  
NIP : 196206041988031001  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik

Pada hari ini Selasa tanggal 8 - 04 - 2025 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Skripsi.

Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Selasa pukul 11.00 tempat di Politeknik Negeri Sriwijaya. Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Skripsi.

Pihak Pertama

Msy. Nur Aisyah Putri  
NIM. 062140512619

Palembang, April 2025

Pihak Kedua

Sulaiman, S.E., M.M  
NIP. 196206041988031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 197104121998022001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
JURUSAN AKUNTANSI

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar-Palembang 30139 Telp (0711)353414  
Laman: <http://polsri.ac.id>, Pos El: [Info@polsri.ac.id](mailto:Info@polsri.ac.id)

**KESEPAKATAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

**Pihak Pertama**

Nama : Msy. Nur Aisyah Putri  
NIM : 062140512619  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik

**Pihak Kedua**

Nama : Sri Hartaty, S.E., M.Si, Ak., CA  
NIP : 197608192002122001  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : DIV Akuntansi Sektor Publik

Pada hari ini Jumat tanggal 21 Maret 2025 telah sepakat untuk melakukan konsultasi bimbingan Skripsi. Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan bimbingan pada setiap hari Jumat pukul 10.00 WIB s/d selesai bertempat di Politeknik Negeri Sriwijaya.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran guna kelancaran penyelesaian Skripsi.

Pihak Pertama

**Msy. Nur Aisyah Putri**  
NIM. 062140512619

Palembang, April 2025

Pihak Kedua

**Sri Hartaty, S.E., M.Si, Ak., CA**  
NIP. 197608192002122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

**Dr. Kartika Rachma Sari, S.E., M.Si, Ak., CA**  
NIP. 197104121998022001



**TABULASI DATA LN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
PERIMBANGAN, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN  
BELANJA DAERAH**

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (X1)</b>	<b>Danaa Perimbangan (X2)</b>	<b>SiLPA (X3)</b>	<b>Belanja Daerah (Y)</b>
1.	Banda Aceh	2019	26,18337493	27,34705983	24,10819765	27,71606361
		2020	26,15150392	27,28654665	23,49899976	27,34915527
		2021	26,13653896	27,31046533	23,68595348	27,81962838
		2022	26,47529277	27,34047716	23,07035829	27,9198627
		2023	26,38402806	27,33789632	24,06830378	27,84496645
2.	Langsa	2019	25,4703196	27,14940209	24,35480686	27,43516909
		2020	25,56175062	26,97890283	23,49899976	27,34915527
		2021	25,41615453	27,11951656	23,51416276	27,38282842
		2022	25,70880076	26,96475529	24,17061955	27,34888399
		2023	25,83701649	27,06668654	24,37826825	27,37505766
3.	Lhokseumawe	2019	24,84136857	27,13228486	24,01758474	27,49573459
		2020	24,91103858	27,03361537	23,55606971	27,28522646
		2021	24,85015226	27,13302672	24,46202218	27,23402661
		2022	24,94589377	27,15744884	24,60451229	27,43926682
		2023	24,94133054	27,17042365	23,07854154	27,31419994
4.	Sabang	2019	24,80637574	26,89492259	25,27390142	27,15928794
		2020	24,85702706	26,76593318	25,16114301	27,0740491
		2021	24,77987805	26,8025671	25,42235033	27,14953964
		2022	24,71007801	26,7278563	24,60998925	27,11911742
		2023	24,68525289	26,73375952	24,28733163	27,07620642
5.	Binjai	2019	25,41419644	27,3055296	22,54587652	27,5307317
		2020	25,44420446	27,22427216	22,88205273	27,50232961
		2021	25,24490596	27,27053085	22,96566322	27,49562974
		2022	25,40319427	27,2844603	22,06717662	27,51436343
		2023	25,45171167	27,31505404	22,5720959	27,54746892
6.	Gunungsitoli	2019	24,19551552	27,04958493	24,49582527	27,11931978
		2020	23,96312998	26,99460693	24,41053588	27,09914858
		2021	23,78749523	27,00129148	23,90639731	27,26484042
		2022	23,95136886	26,98733097	24,38249291	27,26945084
		2023	24,03377192	27,0843052	24,69058442	27,41843626
7.	Medan	2019	28,23515449	28,39965016	24,9326773	29,25224702
		2020	28,04278871	28,35189196	26,95108875	29,01517653
		2021	28,27629661	28,35371753	27,15726842	29,13490853
		2022	28,43327132	28,36389751	27,76781904	29,43061964
		2023	28,52415887	28,54047155	27,03053485	29,4687798



No.	Provinsi	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Danaa Perimbangan (X2)	SiLPA (X3)	Belanja Daerah (Y)
8.	Pematangsiantar	2019	25,55172758	27,41838891	24,90755651	27,56358178
		2020	25,66524483	27,29166878	25,5315606	27,53889071
		2021	25,57988084	27,26128642	25,30257105	27,49935842
		2022	25,76158719	27,29448256	25,42973167	27,50956414
		2023	25,67257624	27,32471481	25,79909953	27,63754918
9.	Sibolga	2019	24,96188703	26,94264499	23,38915289	27,08816092
		2020	25,09951728	26,8635989	24,50386634	27,06588596
		2021	25,05746405	26,87610328	25,19338711	27,08856641
		2022	25,13482883	26,9146841	25,25186624	27,2884482
		2023	25,19086948	26,88608381	25,19096625	27,26217529
10.	Tanjungbalai	2019	24,87778497	27,0285353	22,87012614	27,19701599
		2020	24,873974	26,94300906	22,418037	27,1139298
		2021	24,79485628	26,93921549	23,43006218	27,06523134
		2022	24,83646403	26,94282996	24,64211826	27,14775225
		2023	25,13861158	26,98827802	24,21911914	27,22492308
11.	Tebing Tinggi	2019	25,37950852	26,93666711	24,17632296	27,261316
		2020	25,23391985	26,85524114	24,18758246	27,20594616
		2021	25,14126662	26,84865112	24,05215628	27,2288767
		2022	25,20905761	26,89516453	24,17901936	27,24658391
		2023	25,30116879	26,97766856	22,35529476	27,23655178
12.	Bukittinggi	2019	25,44084104	27,03692968	25,20728847	27,29768353
		2020	25,15512569	26,94486575	25,40330081	27,40280783
		2021	25,24272876	26,96851046	25,27056406	27,20031716
		2022	25,59691177	27,00098939	25,61345706	27,33538644
		2023	25,53636611	26,98882345	25,07124678	27,34499096
13.	Padang	2019	27,02608364	28,05260224	25,41458402	28,48607423
		2020	26,93766536	27,97753993	24,71109824	28,39178464
		2021	27,01285832	27,98388174	24,52601792	28,42484749
		2022	27,14135609	28,02326946	23,96767837	28,43075974
		2023	27,21360132	28,05801306	25,22086454	28,47460092
14.	Padang Panjang	2019	25,07125924	26,83934762	24,95606252	27,11959253
		2020	25,09812689	26,74600589	24,57431851	27,02102445
		2021	25,25671012	26,75211547	24,65137724	27,04353023
		2022	25,17424973	26,73749231	24,9057226	27,02443521
		2023	25,35120037	26,7419524	24,79587732	27,05228079
15.	Pariaman	2019	24,32509321	26,98952964	24,71733167	27,27928153
		2020	24,21861411	26,91257287	23,91559625	27,19272558
		2021	24,36169481	26,88807926	21,74674878	27,14192404
		2022	24,30790514	26,90042356	21,75145957	27,13083252
		2023	24,38327247	26,94938449	20,39256269	27,15163604

No.	Provinsi	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Danaa Perimbangan (X2)	SiLPA (X3)	Belanja Daerah (Y)
16.	Payakumbuh	2019	25,36833184	27,13605118	25,03460599	27,41454234
		2020	25,47682522	26,97260586	24,81669586	27,27756816
		2021	25,22630706	26,97022998	25,0372266	27,24200981
		2022	25,56715684	27,00845915	25,03146075	27,26849475
		2023	25,53720875	27,09564876	25,06737094	27,32084036
17.	Sawahlunto	2019	24,76931251	26,92811011	23,28339025	27,03634979
		2020	24,80987029	26,8226021	23,31620836	26,89055552
		2021	24,66630942	26,81462548	24,5090248	27,11883633
		2022	24,92677857	26,97095053	24,37961455	27,19042624
		2023	24,81667395	26,92324601	23,21770576	27,13190156
18.	Pekanbaru	2019	27,28871276	27,89706559	23,15981473	28,49145684
		2020	27,14990044	27,89894304	23,45070119	28,4816767
		2021	27,25216332	27,86592523	23,22048533	28,47206915
		2022	27,40665367	27,94958111	24,15589313	28,54437432
		2023	27,51480953	28,03662818	23,41031432	28,64218494
19.	Tanjungpinang	2019	25,72381339	27,28028729	25,4263227	27,66121229
		2020	25,70562183	27,32788697	24,88985139	27,60736516
		2021	25,63293408	27,18343695	25,29169314	27,54805568
		2022	25,9189634	27,35400528	25,26991097	27,63132035
		2023	25,80581537	27,23431374	25,5070906	27,69061266
20.	Lubuk Linggau	2019	25,33789373	27,36132999	21,00344065	27,57342615
		2020	25,18132208	27,33940403	20,53981896	27,6509423
		2021	25,57761869	27,22309308	21,48699528	27,57810887
		2022	25,37149508	27,3814223	24,05469064	27,78186994
		2023	25,51603755	27,28121075	24,16128633	27,57997896
21.	Pagaralam	2019	24,81867963	27,18581776	23,3205453	27,42004556
		2020	25,20203158	27,19584059	24,46228813	27,41376087
		2021	24,76438523	27,06201194	25,25892325	27,32220638
		2022	24,94079827	27,34774631	25,43980988	27,50886461
		2023	25,09899396	27,29503741	25,85414268	27,59176544
22.	Prabumulih	2019	25,33814439	27,48234413	25,60788259	27,7677832
		2020	25,16635294	27,29622266	25,86998571	27,65476793
		2021	25,16635294	27,29622266	25,86998571	27,65476793
		2022	25,34424211	27,37679522	25,7201587	27,62523507
		2023	25,51587937	27,46499378	25,76381696	27,70576698
23.	Pangkalpinang	2019	25,76744111	27,17155835	25,91528915	27,58469172
		2020	25,67177319	27,06092656	25,66487225	27,51022029
		2021	25,85235986	27,19647327	25,28566367	27,52910732
		2022	26,03139256	27,20625183	25,65786671	27,6135579
		2023	26,01089167	27,29870777	25,81610556	27,73013026

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (X1)</b>	<b>Danaa Perimbangan (X2)</b>	<b>SiLPA (X3)</b>	<b>Belanja Daerah (Y)</b>
24.	Bengkulu	2019	25,93164834	27,54081479	24,79444434	27,75566191
		2020	25,76765421	27,42553556	25,2546944	27,87776294
		2021	25,88995357	27,4340344	23,16262991	27,70476935
		2022	26,0237189	27,47249576	24,82512292	27,72689168
		2023	26,07261438	27,51710391	24,51501813	27,76857337
25.	Jambi	2019	26,69816797	27,73554061	25,87611887	28,13815652
		2020	26,59728272	27,66683119	26,07595863	28,14140619
		2021	26,6758093	27,66048466	25,83096124	28,18511189
		2022	26,80325843	27,69089626	25,79642924	28,11514177
		2023	26,82908676	27,67424978	25,95993513	28,17349392
26.	Sungai Penuh	2019	24,27577392	27,13453897	24,3498392	27,28596941
		2020	24,09230242	27,07966789	24,66383158	27,12937921
		2021	24,80271285	27,04097467	25,21732588	27,41239301
		2022	24,96116854	27,10560491	24,8831679	27,39777535
		2023	24,96652781	27,11505257	24,63054407	27,39365261
27.	Bandar Lampung	2019	27,16468522	27,9679384	22,89801796	28,41468834
		2020	27,01027355	27,90894366	23,38121403	28,38596736
		2021	27,05883346	27,90909332	23,19224912	28,33332183
		2022	27,19401183	27,96502967	23,47059248	28,4523942
		2023	27,2667117	28,02348823	23,47031181	28,45419492
28.	Metro	2019	25,89488171	27,18769682	25,1728277	27,52844407
		2020	26,12436363	27,07238383	25,38844786	27,57568341
		2021	26,33582827	27,0359802	25,00447481	27,55638164
		2022	26,20322905	27,05672338	25,11738283	27,4314608
		2023	26,37316555	27,08562439	24,80379856	27,61422105

## Hasil Output Eviews

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 07/04/25  
Time: 15:00  
Sample: 2019 2023

	Y	X1	X2	X3
Mean	27.59842	25.62586	27.26144	24.45277
Median	27.49568	25.42850	27.16394	24.63633
Maximum	29.46878	28.52416	28.54047	27.76782
Minimum	26.89056	23.78750	26.72786	20.39256
Std. Dev.	0.521507	0.971567	0.402974	1.239524
Skewness	1.508215	0.859034	1.180231	-0.660276
Kurtosis	5.087070	3.548613	3.806190	4.050788
Jarque-Bera	78.48585	18.97428	36.29337	16.61343
Probability	0.000000	0.000076	0.000000	0.000247
Sum	3863.779	3587.620	3816.602	3423.387
Sum Sq. Dev.	37.80370	131.2079	22.57199	213.5624
Observations	140	140	140	140

### Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: MODE\_FEM  
Test cross-section fixed effects

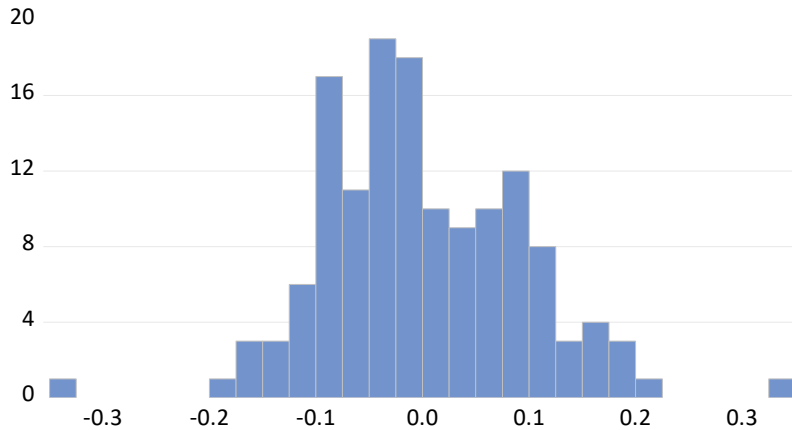
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.943238	(27,109)	0.0000
Cross-section Chi-square	95.404660	27	0.0000

### Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: MODEL\_REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.725679	3	0.0332

### Hasil Uji Normalitas



Series: Residuals	
Sample 1 140	
Observations 140	
Mean	-4.34e-15
Median	-0.010709
Maximum	0.325686
Minimum	-0.327189
Std. Dev.	0.092885
Skewness	0.213104
Kurtosis	3.896884
Jarque-Bera	5.751975
Probability	0.056360

### Hasil Uji Autokorelasi

Test Equation:  
 Dependent Variable: RESID  
 Method: Least Squares  
 Date: 07/04/25 Time: 19:47  
 Sample: 1 140  
 Included observations: 140

R-squared	0.104673	Mean dependent var	-4.34E-15
Adjusted R-squared	0.071265	S.D. dependent var	0.092885
S.E. of regression	0.089514	Akaike info criterion	-1.946929
Sum squared resid	1.073712	Schwarz criterion	-1.820859
Log likelihood	142.2851	Hannan-Quinn criter.	-1.895698
F-statistic	3.133204	Durbin-Watson stat	1.993161
Prob(F-statistic)	0.010450		

### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey  
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.520577	Prob. F(3,136)	0.0606
Obs*R-squared	7.374127	Prob. Chi-Square(3)	0.0609
Scaled explained SS	10.07937	Prob. Chi-Square(3)	0.0179

## Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors  
 Date: 07/04/25 Time: 19:47  
 Sample: 1 140  
 Included observations: 140

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.601050	9542.695	NA
X1	0.000293	3058.908	4.359356
X2	0.001640	19354.58	4.197915
X3	4.48E-05	426.7333	1.085902

## Hasil Analisis Model Terpilih

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 07/04/25 Time: 14:41  
 Sample: 2019 2023  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 28  
 Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.309458	3.220542	1.959129	0.0527
X1	0.156000	0.048690	3.203916	0.0018
X2	0.607841	0.120794	5.032065	0.0000
X3	0.029474	0.010148	2.904405	0.0045

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.065828	R-squared	0.983952
Mean dependent var	27.59842	Adjusted R-squared	0.979535
S.D. dependent var	0.521507	S.E. of regression	0.074604
Akaike info criterion	-2.160682	Sum squared resid	0.606668
Schwarz criterion	-1.509318	Log likelihood	182.2477
Hannan-Quinn criter.	-1.895987	F-statistic	222.7730
Durbin-Watson stat	2.257711	Prob(F-statistic)	0.000000

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/04/25 Time: 14:41  
Sample: 2019 2023  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 28  
Total panel (balanced) observations: 140

---

---

Root MSE	0.065828	R-squared	0.983952
Mean dependent var	27.59842	Adjusted R-squared	0.979535
S.D. dependent var	0.521507	S.E. of regression	0.074604
Akaike info criterion	-2.160682	Sum squared resid	0.606668
Schwarz criterion	-1.509318	Log likelihood	182.2477
Hannan-Quinn criter.	-1.895987	F-statistic	222.7730
Durbin-Watson stat	2.257711	Prob(F-statistic)	0.000000

---

---

### Hasil Uji Simultan (Uji F)

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/04/25 Time: 14:41  
Sample: 2019 2023  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 28  
Total panel (balanced) observations: 140

---

---

Root MSE	0.065828	R-squared	0.983952
Mean dependent var	27.59842	Adjusted R-squared	0.979535
S.D. dependent var	0.521507	S.E. of regression	0.074604
Akaike info criterion	-2.160682	Sum squared resid	0.606668
Schwarz criterion	-1.509318	Log likelihood	182.2477
Hannan-Quinn criter.	-1.895987	F-statistic	222.7730
Durbin-Watson stat	2.257711	Prob(F-statistic)	0.000000

---

---

### Hasil Uji Parsial (Uji T)

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 07/04/25 Time: 14:41  
Sample: 2019 2023  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 28  
Total panel (balanced) observations: 140

---

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.309458	3.220542	1.959129	0.0527
X1	0.156000	0.048690	3.203916	0.0018

---

---

X2	0.607841	0.120794	5.032065	0.0000
X3	0.029474	0.010148	2.904405	0.0045

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

---



---

Root MSE	0.065828	R-squared	0.983952
Mean dependent var	27.59842	Adjusted R-squared	0.979535
S.D. dependent var	0.521507	S.E. of regression	0.074604
Akaike info criterion	-2.160682	Sum squared resid	0.606668
Schwarz criterion	-1.509318	Log likelihood	182.2477
Hannan-Quinn criter.	-1.895987	F-statistic	222.7730
Durbin-Watson stat	2.257711	Prob(F-statistic)	0.000000

---



---



**Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

**Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)**

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung